

Statistik Pendidikan dan Budaya Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Statistik Pendidikan dan Budaya Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018



Statistik Pendidikan dan Budaya Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018

ISBN : 978-602-567-341-2

No. Publikasi : 71520.2005

Katalog : 4101024.71

Ukuran Buku: 14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman: xiv + 91 halaman

Naskah:

Bidang Statistik Sosial

Penyunting:

Bidang Statistik Sosial

Gambar Sampul oleh:

Bidang Statistik Sosial

Diterbitkan oleh:

© BPS Provinsi Sulawesi Utara

Dicetak oleh:

Sumber Ilustrasi:

Photo by Aaron Burden on unsplash.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Tim Penyusun

**Statistik Pendidikan dan Budaya Provinsi Sulawesi
Utara
Tahun 2018**

Pengarah:

Dr. Ateng Hartono, SE, M.Si

Penanggung Jawab Teknis:

Dendi Handiyatmo, SST, M.Si

Naskah:

Muhammad Ihsan, SST

Desain Kover:

Muhammad Ihsan, SST

Penyunting:

Junitha Joce Sahureka, SST



KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Pendidikan dan Budaya Provinsi Sulawesi Utara 2018 menyediakan informasi mengenai kondisi dan perkembangan dunia pendidikan dan budaya di Sulawesi Utara. Data yang disajikan mencakup beberapa aspek kegiatan pendidikan dan budaya.

Sebagian besar data yang digunakan dalam publikasi ini adalah data primer hasil Survei Ekonomi Nasional (Susenas) dan data sekunder dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara.

Kehadiran publikasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam memberikan rekomendasi terkait kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama yang berkepentingan dalam pengembangan dan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan publikasi ini. Kritik dan saran membangun untuk perbaikan publikasi di masa yang akan datang sangat diharapkan.

Manado, Juli 2020
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Utara

Dr. Ateng Hartono, SE, M.Si.

DAFTAR ISI

	halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xiii
1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Sistematika Penyajian	3
2 Metodologi	7
2.1 Sumber Data	7
2.1.1 Ruang Lingkup	9
2.1.2 Metode Pengumpulan Data.....	9
2.1.3 Petugas Lapangan	9
2.2 Konsep dan Definisi	10
2.2.1 Rumah Tangga dan Anggota Rumah Tangga.....	10
2.2.2 Daftar Istilah	11
2.3 Metode Analisis.....	16
3 Sarana dan Prasarana Pendidikan	17
3.1 Guru dan Sekolah	18
3.2 Sarana ke Sekolah	21
3.3 Beasiswa.....	23
4 Partisipasi Pendidikan	27
4.1 Pendidikan Anak Usia Dini	28
4.2 Partisipasi Sekolah.....	31
5 Hasil dan Capaian Proses Pendidikan	37
5.1 Angka Melek Huruf	38
5.2 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.....	42
5.3 Rata-rata Lama Sekolah.....	46
6 Akses Media Massa	49
6.1 Akses Terhadap Media Elektronik	50
6.2 Akses Terhadap Media Cetak.....	55

7	Kegiatan Olahraga.....	63
7.1	Partisipasi Berolahraga	64
7.2	Tujuan Berolahraga.....	65
7.3	Frekuensi dan Intensitas Berolahraga.....	67
7.4	Jenis Olahraga.....	69
7.5	Jalur/Wadah Olahraga.....	70
8	Interaksi Sosial	73
8.1	Partisipasi dalam Kegiatan Pertemuan (Rapat)	74
8.2	Partisipasi dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan.....	78
8.3	Partisipasi dalam Kegiatan Organisasi.....	81
9	Akses Terhadap Kegiatan Seni dan Budaya.....	85
9.1	Akses pada Pertunjukan/Pameran Seni.....	86
9.2	Akses pada Peninggalan Sejarah/Warisan Budaya.....	88
9.3	Tradisi Lisan.....	90

DAFTAR TABEL

halaman

3	Sarana dan prasarana pendidikan	17
3.1	Rasio Murid-Guru, 2018	21
3.2	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas Yang Masih Sekolah Menurut Sarana Pergi Ke Sekolah Dan Jenjang Pendidikan, 2018.....	22
3.3	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Bersekolah Menurut Apakah Menerima Beasiswa, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2018.....	24
3.4	Persentase Siswa Penerima Beasiswa Menurut Sumber Beasiswa Dan Jenjang Pendidikan, 2018.....	25
4	Partisipasi Pendidikan	27
4.1	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke atas menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, 2018	32
4.2	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke atas menurut Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah, 2018 ...	34
5	Hasil dan Capaian Proses Pendidikan	37
5.1	Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Melek Huruf menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2018.....	39
5.2	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2018	45
5.3	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Status Ekonomi, 2018	46

6	Akses Media Massa.....	49
6.1	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Mendengarkan Radio Selama Seminggu Terakhir Menurut Frekuensi Mendengarkan dan Tipe Daerah, 2018.....	52
6.2	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Mendengarkan Radio Selama Seminggu Terakhir Menurut Frekuensi Mendengarkan dan Jenis Kelamin, 2018.....	52
6.3	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Menonton Televisi Selama Seminggu Terakhir Menurut Frekuensi Menonton dan Tipe Daerah, 2018.....	54
6.4	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Menonton Televisi Selama Seminggu Terakhir Menurut Frekuensi Menonton dan Jenis Kelamin, 2018.....	55
6.5	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Membaca Surat Koran/Surat Kabar menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2018.....	56
6.6	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Membaca Majalah/Tabloid menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2018.....	58
6.7	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Membaca Buku Cerita menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2018.....	59
6.8	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Membaca Buku Pelajaran Sekolah menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2018.....	60
6.9	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Membaca Buku Pengetahuan menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2018.....	61
6.10	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Membaca Kitab Suci menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2018.....	62
7	Kegiatan Olahraga.....	63
7.1	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang	

	Melakukan Olahraga Selama Seminggu Terakhir Menurut Tujuan Olahraga dan Tipe Daerah, 2018	66
7.2	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Melakukan Olahraga Selama Seminggu Terakhir Menurut Lamanya Melakukan Olahraga (Hari) dan Tipe Daerah, 2018.....	68
7.3	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Melakukan Olahraga Selama Seminggu Terakhir Menurut Rata-Rata Lamanya Melakukan Olahraga per Hari dan Tipe Daerah, 2018.....	69
7.4	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Melakukan Olahraga Selama Seminggu Terakhir Menurut Jalur Melakukan Olahraga dan Tipe Daerah, 2018.....	71
8	Interaksi Sosial	73
8.1	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Yang Tidak Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Selama Tiga Bulan Terakhir Menurut Alasan Utama Tidak Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Dan Tipe Daerah, 2018.....	80
8.2	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Mengikuti Kegiatan Organisasi Selain di Tempat Kerja/Sekolah Menurut Jenis Kelamin, Alasan dan Tipe Daerah, 2018.....	82
8.3	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Yang Mengikuti Kegiatan Organisasi Selain Di Tempat Kerja/Sekolah Menurut Jenis Kegiatan, 2018	83
8.4	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Yang Mengikuti Kegiatan Organisasi Selain Di Tempat Kerja/Sekolah Menurut Alasan Mengikuti Kegiatan, 2018	84
9	Akses Terhadap Kegiatan Seni dan Budaya	85
9.1	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Yang Menonton Pertunjukan/Pameran Seni Secara Langsung Selama Tiga Bulan Terakhir Menurut Jenis Kesenian	87

	Dan Tipe Daerah, 2018	
9.2	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Yang Terlibat Langsung Pertunjukan/Pameran Seni Secara Langsung Selama Tiga Bulan Terakhir Menurut Jenis Kesenian Dan Tipe Daerah, 2018	88
9.3	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah/Warisan Budaya Selama Setahun Terakhir Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2018	89
9.4	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Mengetahui Dongeng/Cerita Rakyat Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin,2018	91

DAFTAR GAMBAR

	halaman
3.1 Jumlah Guru dan Murid Sekolah menurut Jenjang Pendidikan, 2018.....	20
4.1 Persentase Penduduk Umur 0-6 Tahun menurut Partisipasi Pendidikan Pra Sekolah, 2018	30
5.1 Persentase Penduduk 5 Tahun Ke Atas yang Mengakses Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Tipe Daerah, 2018.....	41
5.2 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan yang Ditamatkan, 2018	43
5.3 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan yang Ditamatkan dan Tipe Daerah, 2018.....	44
5.4 Rata-rata Lama Sekolah, 2018	47
6.1 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Mendengarkan Siaran Radio Selama Seminggu Terakhir Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2018	51
6.2 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Menonton Televisi Selama Seminggu Terakhir Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2018.....	53
6.3 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Membaca Majalah/Tabloid menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin 2018	57
7.1 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Melakukan Olahraga Selama Seminggu Terakhir Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2018	65

7.2	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Melakukan Olahraga Selama Seminggu Terakhir Menurut Jenis Olahraga yang Paling Sering Dilakukan, 2018.....	70
8.1	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Mengikuti Kegiatan Pertemuan (Rapat) di Lingkungan Sekitar dalam Setahun Terakhir Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2018	75
8.2	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Memberikan Saran/Pendapat Dalam Kegiatan Pertemuan (Rapat) di Lingkungan Sekitar Setahun Terakhir Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2018	76
8.3	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan selama Tiga bulan Terakhir Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2018	78



PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran minimal pada tingkat pendidikan dasar. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa. Pemerataan, akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya.

Selanjutnya arah pembangunan pendidikan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional

(RPJMN) 2015-2019 dan dilanjutkan dengan RPJMN 2020-2025 yang merupakan tahapan terakhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Fokus utama dalam pembangunan pendidikan hingga kini masih pada peningkatan dan pemerataan pendidikan. Sebagaimana dikutip dalam RPJMN 2015-2019, tantangan dalam pembangunan pendidikan adalah mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan dasar berkualitas, dan meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi; menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok sosial-ekonomi, antarwilayah, dan antarjenis kelamin; serta meningkatkan pembelajaran sepanjang hayat.

Seperti halnya pendidikan, kebudayaan juga menjadi hal penting yang patut diperhatikan dalam pembangunan. Peran kebudayaan mampu menciptakan investasi tersendiri dalam membangun masa depan dan peradaban bangsa di segala lini kehidupan. Budaya bukan hanya sekedar mampu menciptakan peluang ekonomi saja, akan tetapi dapat diwariskan pada generasi selanjutnya. Sejalan dengan RPJPN tahun 2005-2025, pembangunan kebudayaan mencakup pembangunan bidang sosial, budaya dan kehidupan beragama yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab serta mewujudkan bangsa

yang berdaya saing dalam rangka mengembangkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.

Guna menentukan strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan pembangunan di bidang Pendidikan dan kebudayaan khususnya di Provinsi Sulawesi Utara dibutuhkan informasi yang secara lengkap dapat menjelaskan kondisi dan situasi pembangunan. Informasi tersebut digambarkan melalui berbagai macam indikator yang berkaitan dengan capaian pembangunan di bidang Pendidikan serta kebudayaan yang disajikan dalam publikasi ini.

1.2 Tujuan

Secara umum, publikasi ini menyajikan data dan informasi yang diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan maupun program pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan data yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018 serta data sekunder dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018. Data-data yang disajikan, didisagregasi menurut jenis kelamin dan wilayah.

1.3 Sistematika Penyajian

Secara sistematis publikasi ini disajikan dalam Sembilan bab. Bab pertama berisi latar belakang penyusunan publikasi, tujuan dan sistematika penyajian. Bab kedua menyajikan

metodologi yang digunakan mencakup sumber data, konsep dan definisi, serta metode analisis.

Empat bagian berikutnya secara berturut-turut menyajikan gambaran mengenai kondisi dan perkembangan pendidikan di Sulawesi Utara, pada Bab tiga menyajikan sarana dan prasarana pendidikan, mencakup jumlah murid dan guru, sarana ke sekolah, dan murid yang menerima beasiswa. Bab keempat memberikan penjelasan mengenai partisipasi pendidikan yang meliputi pendidikan anak pada usia dini, dan partisipasi sekolah. Hasil pembangunan pendidikan antara lain dicerminkan oleh angka buta huruf, pendidikan yang ditamatkan, dan alasan tidak/belum pernah sekolah/tidak sekolah lagi yang disajikan pada Bab kelima. Pada bab keenam berisi penjelasan mengenai akses terhadap media massa.

Selanjutnya tiga bagian terakhir secara berturut-turut memberikan gambaran mengenai kondisi dan perkembangan di bidang kebudayaan. Pada bab tujuh berisi kegiatan olahraga yang mencakup tujuan berolahraga, partisipasi bersekolah, frekuensi dan intensitas berolahraga, jenis olahraga dan jalur/wadah olahraga. Bab kedelapan memberikan penjelasan terkait organisasi sosial yang mencakup partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan kegiatan organisasi. Bab terakhir atau bab kesembilan menyajikan penjelasan mengenai akses terhadap kegiatan seni dan budaya yang terdiri atas

akses pada pertunjukan/pameran seni dan akses pada peninggalan sejarah/warisan budaya.

<https://sulut.bps.go.id>

2

METODOLOGI

2.1 Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam publikasi ini adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2018. Jenis data yang digunakan adalah:

- a. Data Kor Susenas Tahun 2018, sebagai dasar untuk memperoleh gambaran makro mengenai penggunaan teknologi komunikasi dan informasi di rumah tangga.
- b. Data Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan, sebagai dasar untuk memperoleh gambaran makro mengenai pendidikan dan kegiatan sosial budaya, mencakup akses media massa, partisipasi olahraga, partisipasi organisasi dan lingkungan, serta kegiatan di luar jam sekolah.

BPS setiap tahun menyelenggarakan Susenas yang dirancang untuk mengumpulkan data yang cakupannya relatif sangat luas, meliputi keseluruhan aspek sosial dan ekonomi. Pertanyaan dalam Susenas dikelompokkan menjadi dua, yaitu Kor dan Modul. KOR merupakan pertanyaan pokok mencakup keseluruhan aspek sosial ekonomi, dan diselenggarakan setiap tahun, sedangkan modul Susenas mencakup pertanyaan yang

lebih rinci dari salah satu aspek sosial ekonomi. Secara keseluruhan, Susenas mempunyai tiga modul yaitu Modul Konsumsi/Pengeluaran, Modul Kesehatan dan Perumahan serta Modul Sosial Budaya dan Pendidikan. Pengumpulan data modul dilakukan secara bergiliran setiap tiga tahun sekali.

Modul Sosial Budaya dan Pendidikan Susenas 2018 memuat beberapa keterangan, di antaranya keterangan penduduk semua kelompok umur tentang penyandang cacat/disabilitas, keluhan kesehatan, ketersediaan pakaian yang layak, kemampuan makan makanan pokok dan ketersediaan tempat tetap untuk tidur; keterangan penduduk berumur 0-6 tahun tentang aktivitas ibu/yang bertanggungjawab terhadap balita; keterangan penduduk 5-18 tahun dan belum kawin tentang kegiatan yang biasa dilakukan bersama orang tua/wali; keterangan penduduk 5 tahun ke atas yang mencakup kegiatan menonton TV, mendengarkan radio, aktivitas membaca, partisipasi kursus, kebiasaan merokok, olahraga, menonton/melakukan pertunjukan kesenian/pameran, pengeluaran konsumsi produk seni budaya, keanggotaan sanggar seni/sarana kegiatan budaya, dan keterangan pendidikan bagi yang masih sekolah, keterangan penduduk 10 tahun ke atas tentang partisipasi kegiatan sosial kemasyarakatan; serta keterangan penduduk 17 tahun ke atas tentang keanggotaan parta politik. Selain itu, memuat juga keterangan modal osial antara lain persepsi kepala rumah tangga

tentang rasa percaya (*trust*) seseorang. Pola hubungan antar kelompok dalam komunitas sosial, hubungan antara dua pihak (individu/kelompok), sikap menerima dan menghargai keberagaman yang berkaitan dengan suku, agama, gender, status sosial ekonomi, kepercayaan dan orientasi politik, serta mengenai kelompok/perkumpulan di dalam dan di luar komunitas.

2.1.1 Ruang Lingkup

Sampel Susenas mencakup 1850 rumah tangga pada September 2018 yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Utara baik daerah perkotaan maupun perdesaan. Estimasi data Susenas Maret dapat dilakukan hingga level kabupaten/kota, sedangkan Susenas September hanya sampai level provinsi. Susenas tidak mencakup rumah tangga yang tinggal dalam blok sensus khusus seperti asrama, penjara dan sejenisnya yang berada di blok sensus biasa.

2.1.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data di setiap rumah tangga terpilih dilakukan melalui wawancara langsung antara pencacah dengan responden. Keterangan individu dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga, suami/istri kepala rumah tangga, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui karakteristik yang ditanyakan.

2.2 Konsep dan Definisi

2.2.1 Rumah Tangga dan Anggota Rumah Tangga

Rumah Tangga (RT) Biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Yang dimaksud satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Rumah tangga biasa umumnya terdiri atas Bapak, Ibu, dan Anak. Rumah tangga yang dicatat dalam Susenas hanya RT biasa.

Anggota Rumah Tangga (ART) adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut maupun yang sedang bepergian kurang dari 6 bulan dan tidak berniat pindah.

Tidak termasuk anggota rumah tangga yaitu orang yang telah bepergian selama 6 bulan atau lebih, atau kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 6 bulan atau lebih). Di sisi lain, orang yang telah 6 bulan atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap dianggap sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.

2.2.2 Daftar Istilah

Alasan Tidak/belum pernah/tidak bersekolah lagi:

- **Belum cukup umur**, apabila umur responden belum memenuhi persyaratan untuk menempuh jenjang Pendidikan tertentu, misalnya: umur 5 tahun belum masuk SD
- **Tidak ada biaya sekolah**, apabila responden atau keluarganya tidak mampu menyediakan biaya pendidikan.
- **Bekerja/mencari nafkah**, adalah bekerja dengan maksud untuk memperoleh atau membantuh memperoleh penghasilan atau keuntungan.
- **Menikah**, apabila responden tidak bersekolah karena menikah/berkeluarga
- **Mengurus rumah tangga**, adalah apabila responden merasa sangat sibuk mengurus rumah tangga atau tidak sempat bersekolah setelah menikah/berkeluarga.
- **Merasa pendidikan cukup**, apabila responden menganggap bekal pendidikan yang dikuasai sudah cukup, dan tidak perlu lagi bersekolah ke kelas/tingkat/jenjang yang lebih tinggi.
- **Sekolah jauh**, apabila responden menganggap jarak sekolah dengan tempat tinggal terlalu jauh, sehingga sukar untuk dicapai.
- **Cacat/disabilitas**
- **Mengalami perundungan/bullying**, apabila responden mengalami kekerasan ancaman, atau paksaan dari orang lain baik secara fisik maupun lisan

- **Malu karena ekonomi**, apabila responden merasa malu karena keadaan ekonomi keluarga lebih rendah dibandingkan teman-temannya
- **Lainnya**, misal: dipaksa berhenti, tidak suka, takut sama guru, dikeluarkan dari sekolah

Angka Buta Huruf (dewasa) : Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang tidak membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya.

Angka Partisipasi Kasar (APK) : Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Angka Partisipasi Murni (APM) : Proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok umurnya.

Angka Partisipasi Sekolah (APS): Proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Beasiswa adalah bantuan dana Pendidikan yang diberikan kepada siswa yang berprestasi. Beasiswa yang ada di perguruan tinggi diantaranya Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM), Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), Peningkatan Prestasi Ekstrakurikuler (PPE), Bantuan Khusus Mahasiswa (BKM).

Bersekolah adalah sekolah pada pendidikan formal dan non formal (Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SM) mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi

termasuk SMP Terbuka, sekolah-sekolah kejuruan yang dikelola oleh lembaga pemerintah selain Kemdiknas.

Biaya pendidikan adalah semua biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan, baik yang sudah dibayarkan maupun yang belum dibayarkan (berupa uang atau barang) untuk membiayai hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan responden, di kelas/tingkat yang saat ini sedang ditempuh.

Kursus adalah penyelenggaraan pendidikan non formal yang mempunyai kurikulum tertentu, jangka waktu tertentu, dan tempat tertentu, yang dikelola oleh suatu lembaga/yayasan. Lama belajar/kursus biasanya kurang dari satu tahun dan mendapat sertifikat. Kursus kedinasan tidak dimasukkan ke dalam kelompok kursus yang dimaksud di sini.

Membaca adalah kegiatan seseorang selama seminggu yang lalu setidaknya-tidaknya pernah membaca satu topik dan mengetahui/mengerti isi dari topik tersebut. Orang tua yang membacakan buku cerita kepada anaknya, dikategorikan membaca buku cerita, sedangkan anak yang hanya mendengarkan tidak dikategorikan membaca buku cerita, sedangkan anak yang hanya mendengarkan tidak dikategorikan membaca.

Mendengarkan Radio adalah kegiatan seseorang mengarahkan pendengarannya pada materi yang disiarkan radio atau meluangkan waktu untuk mendengarkan siaran radio sehingga ia dapat mengikuti, mengerti, atau menikmatinya, baik radio milik

sendiri maupun orang lain. Mendengarkan musik, lagu atau cerita dari *tape recorder* tidak dikategorikan mendengarkan radio.

Mengakses Internet adalah kegiatan seseorang membaca, melihat maupun merekam informasi yang ada di dalam komputer ketika sedang mengakses situs internet. Bila seseorang telah masuk ke dalam suatu situs internet, namun karena alasan kejadian tertentu menyebabkan ia gagal mengakses (membaca, melihat atau merekam) informasi yang ada, maka orang tersebut dianggap tidak mengakses internet.

Menonton Televisi (TV) adalah kegiatan seseorang mengarahkan perhatian pada tayangan TV atau meluangkan waktu untuk menonton tayangan TV sehingga ia dapat mengerti atau menikmati acara yang ditayangkan. Orang tuli yang dapat menikmati/mengerti acara TV yang ditonton, dikategorikan sebagai menonton TV.

Olahraga adalah kegiatan seseorang dengan sengaja meluangkan waktunya untuk melakukan satu atau lebih kegiatan fisik secara teratur (gerak badan dengan gerakan-gerakan tertentu atau dengan macam-macam permainan seperti tenis, voli, sepak bolah, dsb) dengan tujuan meningkatkan kesegaran jasmai, atau meningkatkan prestasi atau untuk hiburan. Kegiatan olahraga dapat berupa latihan atau pertandingan atau untuk rekreasi (hiburan). Melakukan kegiatan seperti berjalan kaki ke tempat bekerja, mengayuh sepeda ke pasar dan kegiatan lain

yang tidak dikhususkan untuk olahraga tidak dikategorikan sebagai melakukan olahraga.

Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Meliputi pendidikan kecakapan hidup (kursus), pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (paket A, paket B, dan paket C) serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan STTB/ijazah.

PT meliputi jenjang pendidikan Diploma I, II, dan IV dan sederajat.

Sarana pergi ke sekolah adalah sarana yang dipergunakan untuk pergi bersekolah. Sarana ini terdiri dari kendaraan yang dikuasai rumah tangga, kendaraan umum bermotor, kendaraan umum tidak bermotor, kendaraan orang lain gratis dan jalan kaki.

SD meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat.

SM meliputi jenjang pendidikan sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah dan sederajat.

SMP meliputi jenjang pendidikan SMP Umum, Madrasah Tsanawiyah, SMP Kejuruan dan sederajat.

Tamat sekolah adalah telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat ijazah. Seorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat.

Tidak/belum sekolah adalah tidak/belum pernah terdaftar an aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk mereka yang tamat Taman Kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.

2.3 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif dengan penyajian data dalam bentuk tabel ulasan sederhana dan visualisasi berupa gambar/grafik untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya. Analisis yang disajikan disertai dengan analisis diferensial untuk melihat perbedaan pola serta gambaran antar daerah perkotaan dan perdesaan. Selain itu disertakan juga analisis tren dalam upaya memperoleh gambaran secara rinci mengenai kecenderungan perkembangan kegiatan pendidikan selama beberapa periode waktu.

3

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu, sesuai dengan tujuan pembangunan yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Hak ini pula yang kemudian dituangkan secara khusus dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Bab IV Bagian 1 pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, kemudian ayat (5) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Kedua ayat ini secara jelas memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk mendapatkan pendidikan yang seluas-luasnya.

Sebagai perwujudan amanat konstitusi tersebut, pemerintah telah memberlakukan berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan pendidikan. Rendahnya mutu pendidikan disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya

adalah belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan yang layak. Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan merupakan prasyarat awal dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karenanya, diperlukan gambaran kondisi pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, agar kebijakan di bidang pendidikan khususnya di bidang sarana dan prasarana dapat lebih tepat arah dan tepat sasaran.

Dalam Bab ini akan disajikan gambaran kondisi sarana dan prasarana antara lain guru dan sekolah, sarana ke sekolah, beasiswa sebagai berikut.

1.1 Guru dan Sekolah

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik (pasal 1 UU No. 14 Tahun 2005). Lewat didikan dan bimbingan guru yang profesional, siswa bisa berkembang menjadi sosok terpelajar. Siswa didikan diharapkan menjadi generasi yang handal dan berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk dapat menghadapi persaingan yang semakin ketat, agar kelak dapat bersaing di pasar tenaga kerja di tingkat nasional maupun internasional.

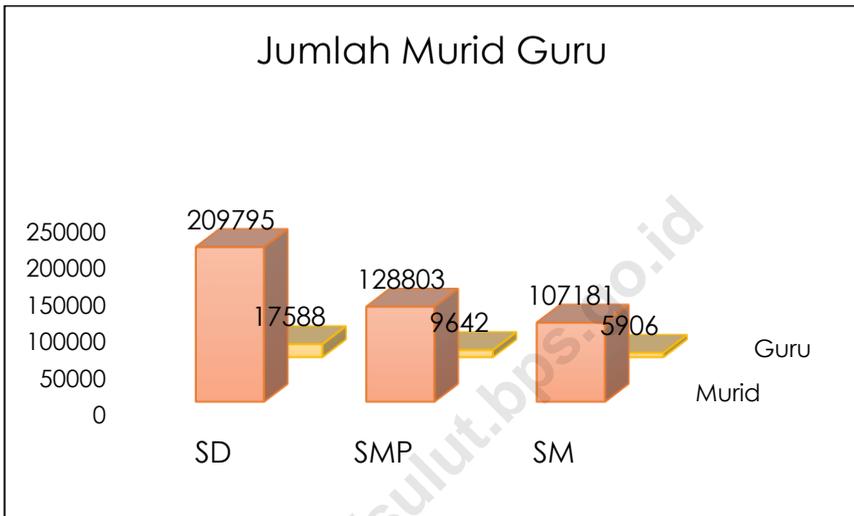
Tidak dapat dipungkiri, bahwa salah satu faktor penting dalam mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu, relevan, dan efisien adalah guru sebagai ujung tombak dalam melaksanakan misi pendidikan di sekolah (Silverius, 2000). Guru merupakan

faktor utama yang memengaruhi keberhasilan pendidikan, oleh sebab itu diperlukan kebijakan untuk memonitor dan mengevaluasi pemerataan dan kecukupan tenaga guru baik secara kuantitas maupun kualitas di semua jenjang pendidikan.

Selain guru sebagai tenaga pendidik, faktor lain yang tak kalah pentingnya dan turut berperan dalam peningkatan mutu pendidikan adalah fasilitas pendidikan. Dewasa ini pemerintah senantiasa melakukan perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan untuk memenuhi pelayanan pendidikan yang memadai dengan menambah gedung-gedung sekolah baru dengan tujuan dapat menciptakan suasana belajar mengajar yang lebih baik. Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi gedung sekolah yang tidak layak pakai sehingga proses belajar mengajar secara interaktif dapat berjalan lebih baik.

Pada Gambar 3.1 disajikan jumlah guru dan murid sekolah menurut jenjang pendidikan berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara dan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Pada 2018 tercatat bahwa jumlah guru yang ada di Sulawesi Utara untuk tingkat SD sebanyak 17.588 orang, SMP sebanyak 9.642 orang, dan SM sebanyak 5.906 orang. Guru-guru tersebut tersebar di 2.346 Sekolah Dasar, 789 Sekolah Menengah Pertama, dan 456 Sekolah Menengah yang ada di Sulawesi Utara.

Gambar 3.1 Jumlah Guru dan Murid Sekolah menurut Jenjang Pendidikan, 2018



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara

Mutu pendidikan atau mutu pengajaran dapat dilihat dari beban guru. Beban guru secara umum dapat diukur melalui indikator rasio murid-guru. Rasio murid-guru adalah perbandingan antara jumlah guru terhadap jumlah murid. Standar ideal rasio murid-guru adalah 1:40 untuk SD, 1:21 untuk SMP, dan 1:21 untuk SM. Dari tabel 3.1 terlihat bahwa selama 2018, pada jenjang pendidikan dasar dan menengah angka rasio murid-guru untuk SD sebesar 1:12, SMP sebesar 1:13 dan untuk SM sebesar 1:18. Ini dapat diartikan bahwa rasio murid per guru sudah memenuhi standar ideal yang dianjurkan sehingga perhatian dan konsentrasi guru serta materi pelajaran dapat diberikan dengan baik kepada setiap murid. Pemberian pelajaran

dari seorang guru terhadap murid yang terlalu banyak dalam satu kelas atau melebihi standar ideal yang dianjurkan tidak akan memberikan hasil yang baik terhadap muridnya.

Tabel 3.1 Rasio Murid-Guru, 2018

Jenjang Pendidikan	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	209.795	17.588	12
SMP	128.803	9.642	13
SM	107.181	5.906	18

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara

1.2 Sarana ke Sekolah

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu prasyarat awal dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karenanya, merupakan hal yang penting untuk mendapatkan gambaran kondisi pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, agar kebijakan di bidang pendidikan khususnya di bidang sarana dan prasarana dapat lebih tepat arah dan sasaran. Informasi tersebut sangat berguna untuk melihat sampai seberapa jauh pemerintah melakukan upaya penyediaan sarana/prasarana pendidikan terutama bagi masyarakat yang bertempat tinggal jauh di pedalaman atau masyarakat yang belum mempunyai fasilitas sekolah.

Tabel 3.2 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas Yang Masih Sekolah Menurut Sarana Pergi Ke Sekolah Dan Jenjang Pendidikan, 2018

Sarana Pergi Ke Sekolah	Jenjang Pendidikan				
	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/ Sederajat	PT	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tanpa Kendaraan	62,01	36,74	17,64	22,17	44,55
Kendaraan Pribadi/Dinas	27,58	21,61	26,41	29,80	26,28
Kendaraan Antar Jemput Sekolah	0,38	2,43	3,89	0,00	1,45
Kendaraan Umum	10,04	39,22	52,06	48,03	27,71
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Susenas MSBP 2018

Hasil Susenas 2018 menunjukkan bahwa hampir separuh siswa pergi ke sekolah tanpa kendaraan/berjalan kaki (44,55 persen) diikuti menggunakan kendaraan umum (27,71 persen), kendaraan pribadi/dinas (26,28 persen), dan kendaraan antar jemput sekolah (1,45 persen) seperti yang terlihat pada tabel 3.2.

Bila dilihat menurut jenjang pendidikan, sebagian besar murid SD/MI (62,01 persen) pergi ke sekolah tanpa kendaraan/berjalan kaki. Ini menggambarkan jarak tempuh ke sekolah yang relatif dekat untuk anak SD pergi ke sekolah. Sejak adanya instruksi Presiden (Inpres) tahun 1973, tentang pembangunan SD di setiap desa/kelurahan memudahkan masyarakat untuk menyekolahkan anak di sekitar daerah tempat tinggal. Sedangkan di jenjang pendidikan menengah dan tinggi, para murid lebih banyak menggunakan kendaraan umum.

Ini berarti meskipun jarak dari rumah ke sekolah relatif jauh, namun transportasi umum yang tersedia dapat dijangkau bagi murid untuk pergi ke sekolahnya.

1.3 Beasiswa

Sebagai bentuk peran aktif dalam menyukseskan berbagai program di bidang pendidikan, pemerintah beserta lembaga swasta dan perorangan lainnya telah berusaha meringankan beban orang tua/murid. Salah satu bentuk peran tersebut adalah diberikannya berbagai jenis beasiswa, baik siswa tidak mampu maupun siswa berprestasi.

Pada tabel 3.3 terlihat bahwa murid laki-laki sebesar 19,44 persen lebih banyak menerima beasiswa dibandingkan murid perempuan sebesar 17,16 persen. Kondisi tersebut tergambar di wilayah perkotaan dan perdesaan, dimana persentase murid laki-laki yang menerima beasiswa lebih tinggi dibanding perempuan yaitu 14,84 persen (perkotaan) dan 24,33 persen (perdesaan).

Tabel 3.3 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Bersekolah menurut Apakah Menerima Beasiswa, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2018

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Apakah Menerima Beasiswa?	
	Ya	Tidak
(1)	(2)	(3)
Kota		
L	14,84	85,16
P	14,22	85,78
Desa		
L	24,33	75,67
P	21,20	78,80
Kota + Desa		
L	19,44	80,56
P	17,16	82,84

Susenas MSBP, 2018

Tabel 3.4 menampilkan persentase siswa penerima beasiswa menurut sumbernya. Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa pada Program Indonesia Pintar, beasiswa yang diterima paling besar pada jenjang SD sebesar 53 persen. Hal ini sejalan dengan program beasiswa bantuan dari pemerintah daerah sebesar 56,17 persen pada jenjang SD. Namun, untuk jenis beasiswa dari pemerintah pusat, jenjang tertinggi yang menerima beasiswa terdapat pada jenjang PT sebesar 32,9 persen.

Tabel 3.4 Persentase Siswa Penerima Beasiswa Menurut Sumber Beasiswa Dan Jenjang Pendidikan, 2018

Sarana Pergi Ke Sekolah	Jenjang Pendidikan			
	SD	SMP	SM	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Indonesia Pintar (PIP)	53,00	29,96	16,39	0,63
Beasiswa Dari Pemerintah Pusat	27,30	30,19	9,61	32,90
Bantuan Dari Pemerintah Daerah	56,17	32,82	8,09	2,92
Beasiswa/Bantuan Dari Lembaga Nonpemerintah	0,00	88,97	0,00	11,03
Lainnya	9,37	11,29	14,73	64,62

Sumber: BPS, Susenas MSBP 2018

4

PARTISIPASI PENDIDIKAN

Cita-cita kemerdekaan negeri ini sebagaimana terkandung pada pembukaan UUD 1945, salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui dokumen kenegaraan, terlihat bahwa pendidikan menjadi fokus utama dari pembangunan yang menjadi hak setiap warga negara, sebagaimana diuraikan pada pasal 28c dan 31 UUD 1945. Pemenuhan hak tersebut tercermin dari sejauh mana pencapaian partisipasi sekolah yang merupakan hak setiap kalangan, tanpa membedakan jenis kelamin, ras, termasuk juga penyandang disabilitas. Hal ini sejalan dengan tujuan keempat SDG's, yakni menjamin kualitas pendidikan yang inklusif, merata dan meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

Sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN 2014-2019 adalah meningkatnya APK SD/MI/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 114,09 persen (2015 : 108 persen), meningkatnya APK SMP/Mts/ sederajat menjadi 106,94 persen (2015 : 100,7 persen), meningkatnya APK SMA/SMK/ sederajat menjadi 91,63 persen (2015 : 76,4 persen).

Indikator partisipasi sekolah selain digunakan untuk memantau program pendidikan yang telah diberikan pemerintah, juga untuk melihat apakah target yang ditetapkan pemerintah tercapai. Partisipasi sekolah menggambarkan efektivitas program pendidikan dalam menyerap potensi pendidikan yang ada di masyarakat, yang artinya semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin efektifnya suatu program.

Untuk memotret gambaran hasil pelaksanaan pembangunan pendidikan 2018 dapat menggunakan Susenas 2018 dilihat dari partisipasi pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi yang akan diuraikan pada bab ini.

4.1 Pendidikan Anak Usia Dini

Masa awal anak-anak adalah periode yang paling cepat dalam kehidupan manusia. Sejak 0 hingga 8 tahun merupakan masa-masa penting untuk melengkapi Kesehatan kognitif, emosional, dan pertumbuhan fisik anak (Khadijah, 2016). UNICEF pada publikasinya *Early Childhood Development: The key to a full and productive life* menyebutkan bahwa banyak perkembangan motorik anak yang dapat ditingkatkan pada usia 2 s.d 5 tahun seperti mempelajari bakat baru, bahasa, mengontrol tangan dan jari, banyak bertanya, meluapkan perasaan, hingga keinginan berbagi serta bermain bersama teman. Dalam masa emas ini, perlu juga diperhatikan asupan nutrisi dan stimulasi positif dari lingkungan sekitar, sehingga kombinasi hal-hal tersebut akan membentuk fondasi masa depan seorang anak.

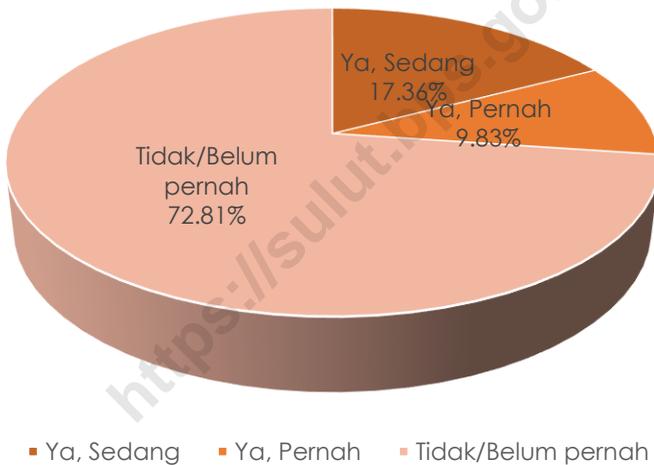
Melihat pentingnya pembentukan anak sebagai dasar penentu kualitas bangsa di masa mendatang, pemerintah melalui Kemendikbud memberikan dukungan penuh dengan pendidikan awal pada anak melalui program wajib Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) satu tahun pra-SD. Kebijakan lainnya adalah penyediaan sarana prasarana serta fasilitas PAUD untuk daerah-daerah terdepan, terluar, dan terpencil (3T), termasuk juga wilayah perbatasan. Selain itu, pemerintah juga telah merintis program PAUD baru bagi desa-desa yang belum terdapat layanan anak usia dini, sejalan dengan program satu desa satu PAUD.

Pemerintah berkomitmen dalam mengembangkan akses serta mutu PAUD melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 84 Tahun 2014 dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Hal-hal mengenai syarat pendirian PAUD, standar tingkat pencapaian pengembangan anak pada PAUD, tenaga pendidik, hingga proses penutupan PAUD telah diatur secara lengkap pada peraturan tersebut. Kelembagaan PAUD di lingkungan masyarakat juga didukung dengan adanya Permendikbud Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini Tahun guna menyediakan dukungan finansial.

Di dalam RPJMN 2014-2019 disebutkan bahwa sasaran pembangunan pendidikan adalah meningkatnya mutu pendidikan

termasuk PAUD. Sasaran yang ingin dicapai pada 2019 adalah meningkatnya APK PAUD menjadi 77,2 persen (2015 :70,06 persen). Salah satu indikator untuk mengukur APK adalah dengan melihat komposisi penduduk usia 0-6 tahun yang berpartisipasi pada pendidikan pra sekolah.

Gambar 4.1 Persentase Penduduk Umur 0-6 Tahun menurut Partisipasi Pendidikan Pra Sekolah, 2018



Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Melalui Grafik 4.1, dapat diperoleh gambaran partisipasi pendidikan pra sekolah penduduk usia 0-6 tahun di Sulawesi Utara. Pada Maret 2018, tingkat partisipasi penduduk umur 0-6 tahun yang pernah/sedang mengikuti pendidikan pra sekolah masih rendah. Pada grafik terlihat bahwa terdapat 17,36 persen penduduk umur 0-6 tahun yang sedang mengikuti pendidikan pra sekolah, 9,83 persen pernah mengikuti pendidikan pra sekolah

dan 72,81 persen tidak/belum pernah mengikuti pendidikan pra sekolah.

4.2 Partisipasi Sekolah

Faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu negara adalah ketersediaan Sumber Daya manusia (SDM) yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu jalan bagi peningkatan kualitas SDM tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah secara terus-menerus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dimulai dengan pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan terutama pada tingkat dasar hingga peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Upaya yang saat ini masih digalakkan diantaranya, mengupayakan anggaran pendidikan sesuai amanat Amandemen UUD 1945 Pasal 31, agar program sekolah gratis minimal pada tingkat dasar di seluruh wilayah Indonesia dapat terwujud sehingga tidak ada hambatan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan tersebut.

Memanfaatkan fasilitas pendidikan tidak hanya bagi penduduk yang tergolong usia sekolah. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk menurut kategori partisipasi sekolah.

Tabel 4.1 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke atas menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah 2018

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Partisipasi Sekolah		
	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Bersekolah Lagi
(1)	(2)	(3)	(4)
Kota			
L	3,46	23,59	72,96
P	1,03	28,12	70,85
L + P	2,24	25,86	71,90
Desa			
L	2,11	23,03	74,86
P	2,24	23,91	73,85
L + P	2,17	23,45	74,37
Kota + Desa			
L	2,80	23,31	73,89
P	1,60	26,14	72,26
L + P	2,21	24,70	73,09

Sumber: Susenas MSBP 2018

Tabel 4.2 menyajikan persentase penduduk usia lima tahun ke atas menurut tipe daerah, jenis kelamin dan partisipasi sekolah. Masih sekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal (pendidikan dasar yaitu SD/MI dan SMP/MTs, pendidikan menengah yaitu SMA/SMK/MA dan pendidikan tinggi yaitu PT) maupun pendidikan non formal (Paket A setara SD, paket B setara SMP dan paket C setara SMA) yang berada di bawah

pengawasan kemendiknas, Kementerian Agama (Kemenag), Instansi negeri lain maupun Instansi Swasta.

Pada wilayah perkotaan, penduduk yang tidak/belum pernah sekolah tertinggi terdapat pada penduduk laki-laki berumur 5 tahun ke atas yaitu sebesar 3,46 persen. Sebaliknya pada wilayah pedesaan, penduduk yang tidak/belum pernah sekolah tertinggi terdapat pada penduduk perempuan berumur 5 tahun ke atas yaitu sebesar 2,24 persen.

Persentase penduduk yang masih sekolah terdapat pada wilayah perkotaan yaitu sebesar 25,86 persen. Pada wilayah perkotaan, penduduk perempuan berumur 5 tahun ke atas memiliki persentase yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu sebesar 28,12 persen sedangkan laki-laki hanya 23,59 persen.

Untuk kategori penduduk berumur 5 tahun ke atas yang tidak bersekolah lagi, wilayah pedesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan. Pada wilayah pedesaan, persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang tidak bersekolah lagi sebesar 74,37 persen. Sedangkan pada wilayah perkotaan sebesar 71,90 persen.

Tabel 4.2 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke atas menurut Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah, 2018

Kelompok Umur	Partisipasi Sekolah		
	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Bersekolah Lagi
(1)			
5 - 6	49,70	50,30	0,00
7 - 12	0,51	99,49	0,00
13 - 15	0,28	94,62	5,10
16 - 18	0,00	73,74	26,26
19 - 24	0,80	21,96	77,23

Sumber: Susenas MSBP 2018

Faktor demografis lain yang juga dapat mempengaruhi akses masyarakat pada pendidikan antara lain adalah umur. Semakin tinggi kelompok umur sekolah semakin rendah tingkat partisipasi sekolahnya. Pada 2018, persentase penduduk yang masih sekolah pada kelompok umur 7-12 tahun (kelompok umur SD/MI) tercatat sebesar 99,49 persen, kelompok umur 13-15 tahun (kelompok umur SMP/MTs) sebesar 94,62 persen, kelompok umur 16-18 tahun (kelompok umur SMA/SMK/MA sederajat) sebesar 73,74 persen dan kelompok umur 19-24 tahun (kelompok umur PT) sebesar 21,96 persen.

Hal menarik yang terlihat pada tabel 4.2 adalah cukup tingginya jumlah penduduk usia 5-6 tahun yang tidak/belum pernah bersekolah. Pada 2018, jumlahnya mencapai 49,70

persen. Hal ini sangat wajar, mengingat pada usia tersebut belum wajib bagi mereka untuk mengenyam pendidikan dasar.

<https://sulut.bps.go.id>

5

HASIL DAN CAPAIAN PROSES PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan memegang peranan penting untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia. Pembangunan pendidikan memberikan kontribusi langsung dalam meningkatkan parameter tingkat melek huruf (literacy) serta jumlah penduduk usia sekolah yang bersekolah, diukur dari APK gabungan pendidikan dasar dan menengah.

Program pembangunan pendidikan yang tercantum dalam RPJMN 2015 difokuskan pada pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Sasaran yang ingin dicapai dalam program tersebut diantaranya yaitu (1) meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah; (2) meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan; serta (3)

menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antardaerah. Pencapaian masing-masing sasaran program strategis diukur dari tingkat pencapaian indikator sasaran strategis yang menjadi tolak ukur keberhasilan masing-masing tujuan strategis sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019.

Dalam publikasi ini, indikator yang digunakan sebagai tolak ukur dalam pencapaian pembangunan yaitu antara lain: Angka Melek Huruf (AMH) penduduk kelompok usia muda dan dewasa, tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk 15 tahun ke atas dan rata-rata lama sekolah.

5.1 Angka Melek Huruf

Kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis dapat dilihat berdasarkan indikator Angka Melek Huruf (AMH). Ukuran AMH digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk di suatu wilayah yang memiliki kemampuan dasar untuk memperluas akses informasi, sehingga bertambah pengetahuan dan keterampilan mereka, yang pada akhirnya penduduk tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup diri, keluarga maupun negaranya di berbagai bidang kehidupan. AMH juga merupakan salah satu indikator pencapaian SDGs, yang menjamin bahwa pada tahun 2030 semua remaja dan proporsi

kelompok penduduk dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

Tabel 5.1 Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Melek Huruf menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2018

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Kelompok Umur (Tahun)			
	15 - 24	25 - 44	45+	15+
(1)				
Kota				
L	100,00	100,00	99,15	99,69
P	100,00	100,00	100,00	100,00
L + P	100,00	100,00	99,59	99,84
Desa				
L	99,85	100,00	100,00	99,97
P	100,00	99,70	99,82	99,81
L + P	99,92	99,86	99,91	99,89
Kota + Desa				
L	99,93	100,00	99,58	99,83
P	100,00	99,86	99,91	99,91
L + P	99,97	99,93	99,75	99,87

Sumber: Susenas MSBP 2018

Pada tahun 2018, AMH 15 tahun ke atas Sulawesi Utara tercatat sebesar 99,97 persen. Besaran ini sudah melewati target dari Renstra Kemendikbud yang ditargetkan mencapai 96,1 persen pada tahun 2019 serta target RPJMN yang besarnya pada tahun 2019 minimal mencapai 97,5 persen. Melalui pencapaian ini, diharapkan kemampuan literasi penduduk

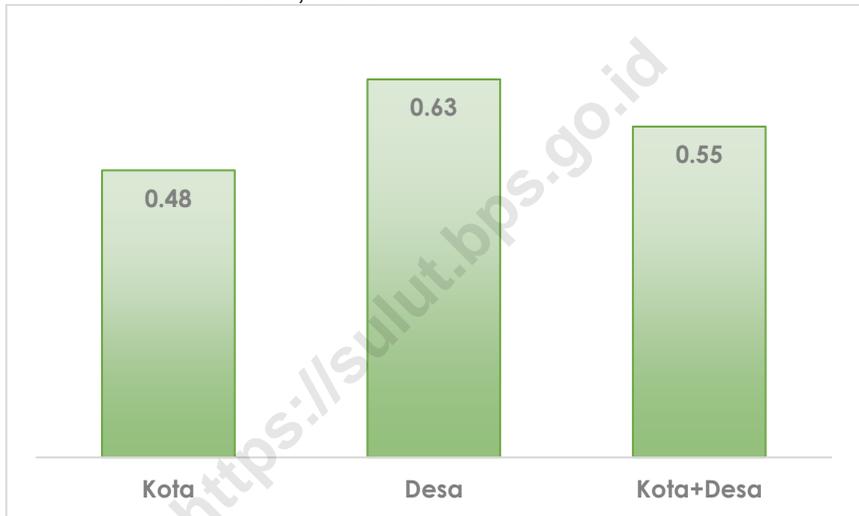
Sulawesi Utara terhadap informasi yang tersedia semakin meningkat, tidak hanya sekedar membaca tanpa meresapi dan memahami apa yang mereka baca.

Jika ditinjau berdasarkan kelompok umur terlihat bahwa hampir seluruh penduduk usia 15-24 tahun sudah melek huruf. Hanya tersisa 0,03 persen penduduk yang buta huruf. Sedangkan untuk kelompok usia 45+ sebanyak 99,75 persen penduduk yang melek huruf. Jika dipandang menurut tipe daerah dan jenis kelamin, tampak bahwa penduduk laki-laki yang tinggal di perkotaan menjadi penyumbang terbesar penduduk kelompok 45+ yang buta huruf.

Selain upaya pemberantasan buta huruf, dalam rangka menumbuhkan minat baca masyarakat diantaranya melalui pembinaan perpustakaan dan pengembangan budaya baca. Salah satu pengembangan budaya baca adalah dengan mendirikan Taman Bacaan Masyarakat (TBM). TBM ini merupakan salah satu Program Pendidikan Keaksaraan yang dibentuk berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Tujuannya adalah memelihara kemampuan warga belajar yang telah bebas buta huruf sehingga tidak buta huruf kembali, memberikan pelayanan belajar pada warga belajar pendidikan luar sekolah (PLS) dan masyarakat dengan menyediakan bahan bacaan sesuai kebutuhan setempat, membangkitkan dan meningkatkan budaya baca masyarakat sebagai bagian dari aktivitas belajar mandiri sehingga tercipta

masyarakat gemar belajar yang berdampak pada peningkatan mutu SDM.

Gambar 5.1 Persentase Penduduk 5 Tahun Ke Atas yang Mengakses Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Tipe Daerah, 2018



Sumber: BPS, Susenas MSBP 2018

Hasil Susenas MSBP 2018 menunjukkan bahwa persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mengakses TBM selama tiga bulan terakhir sebesar 0,55 persen (Gambar 5.1). Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya minat baca masyarakat. Apabila dilihat menurut tipe daerah, persentase penduduk 5 tahun ke atas di perkotaan yang mengakses TBM lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah perdesaan yaitu 0,48 persen berbanding 0,63 persen.

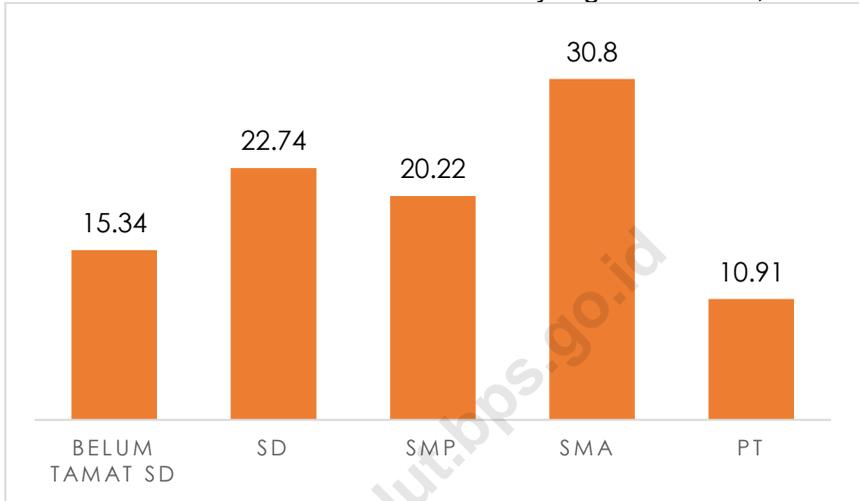
Rendahnya persentase penduduk untuk mengunjungi perpustakaan maupun TBM kemungkinan disebabkan oleh pengelolaan yang kurang maksimal, kurangnya motivasi dan masyarakat sekitar untuk membaca, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membaca. Itulah mengapa budaya membaca perlu ditanam dan dipupuk sejak dini. Sehingga kebiasaan ini akan terus meningkat seiring bertambahnya usia.

5.2 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas SDM, semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Daya saing sebuah bangsa tidak bisa dipisahkan dari mutu dan kualitas SDM-nya. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, merupakan modal dasar pembangunan bangsa. Modal dasar yang berkualitas menjadi tujuan utama pembangunan seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Tingkat pendidikan penduduk Sulawesi Utara umumnya hanya mencapai pendidikan menengah. Data Susenas 2018 menunjukkan bahwa satu dari tiga penduduk 15 tahun ke atas telah tamat SM/ sederajat, dan hanya sekitar sebelas persen yang berhasil menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang Perguruan Tinggi (PT).

Gambar 5.2 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan yang Ditamatkan, 2018



Sumber: BPS, Susenas MSBP 2018

Pada gambar 5.3 dapat dilihat informasi mengenai kesenjangan pendidikan berdasarkan tipe daerah. Persentase penduduk di perdesaan yang berpendidikan rendah (SMP ke bawah) lebih tinggi jika dibandingkan dengan perkotaan. Penduduk di perdesaan sebagian besar hanya tamatan Sekolah Dasar (27,45 persen), sedangkan sebagian besar penduduk perkotaan telah mampu menyelesaikan pendidikannya hingga tamat SM/ sederajat (36,94 persen).

Gambar 5.3 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan yang Ditamatkan dan Tipe Daerah, 2018



Sumber: BPS, Susenas MSBP 2018

Jika dilihat berdasarkan gender, lebih besar persentase penduduk laki-laki yang tamat pendidikan SMP/ sederajat dan SM/ sederajat dibanding perempuan. Namun untuk pendidikan tinggi berlaku sebaliknya.

Tabel 5.2 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2018

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan					Jumlah
	Belum Tamat SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/ Sederajat	PT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kota						
L	12,88	15,81	19,90	39,21	12,20	100,00
P	10,11	21,03	19,19	34,66	15,01	100,00
L + P	11,5	18,41	19,55	36,94	13,60	100,00
Desa						
L	20,26	25,78	22,69	24,84	6,43	100,00
P	18,71	29,27	19,06	23,32	9,64	100,00
L + P	19,52	27,45	20,95	24,11	7,97	100,00
Kota + Desa						
L	16,48	20,67	21,26	32,20	9,38	100,00
P	14,13	24,89	19,13	29,35	12,50	100,00
L + P	15,34	22,74	20,22	30,80	10,91	100,00

Sumber: Susenas MSBP 2018

Tabel 5.3 Menunjukkan bahwa status ekonomi masih membedakan capaian tingkat pendidikan penduduk. Semakin tinggi status ekonomi penduduk, semakin tinggi jenjang pendidikan yang dapat diselesaikan. Pada jenjang SM ke atas, ketimpangan pendidikan antara status ekonomi terbawah (Kuintil 1) dan teratas (Kuintil 5) nyata terlihat. Bahkan, kesenjangan tersebut semakin melebar pada jenjang Perguruan Tinggi. Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang tamat PT dari

rumah tangga dengan status ekonomi teratas (Kuintil 5) jauh lebih besar dibanding rumah tangga dengan status ekonomi terbawah (Kuintil 1), yaitu 25,37 Persen berbanding 2,32 Persen.

Tabel 5.3 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Status Ekonomi, 2018

Status Ekonomi Rumah Tangga	Jenjang Pendidikan					Jumlah
	Belum Tamat SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/ Sederajat	PT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kuintil 1	23,03	28,16	21,28	25,21	2,32	100,00
Kuintil 2	19,97	28,15	22,44	25,94	3,49	100,00
Kuintil 3	14,28	25,67	22,59	28,15	9,32	100,00
Kuintil 4	13,1	16,23	22,70	36,76	11,21	100,00
Kuintil 5	8,19	17,03	13,01	36,41	25,37	100,00

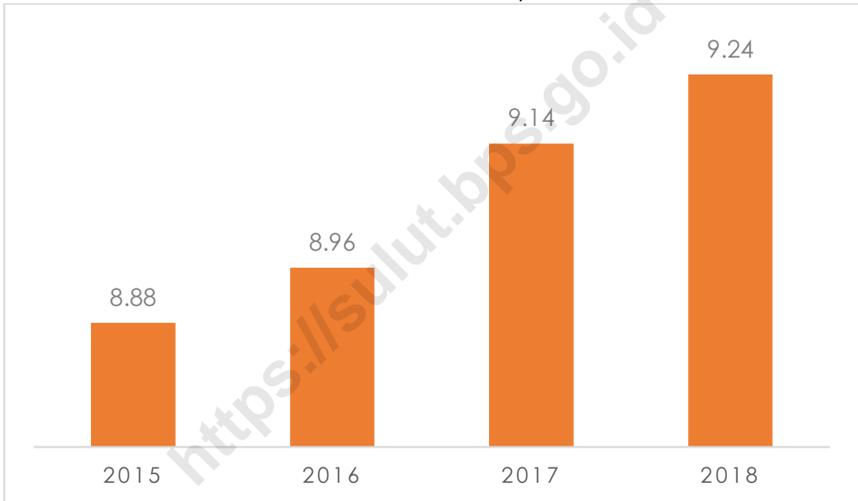
Sumber: Susenas MSBP 2018

5.3 Rata-rata Lama Sekolah

Jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang dapat dilihat berdasarkan Rata-rata lama Sekolah. Semakin tinggi angka Rata-rata lama Sekolah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan. Sampai sejauh mana kemampuan penduduk Sulawesi Utara usia 15 tahun ke atas mengenyam pendidikan di bangku sekolah juga dapat dilihat melalui indikator ini. Sejalan dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021, sejak tahun 2015 Angka rata-rata lama Sekolah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Pada tahun 2018, angka Rata-rata lama Sekolah sebesar 9,24 tahun dan sudah memenuhi target RPJMD 2018 dimana Rata-rata lama Sekolah penduduk 15 tahun ke atas ditargetkan sebesar 9,00 tahun. Capaian ini juga bahkan melewati target RPJMD di tahun 2020.

Gambar 5.4 Rata-rata Lama Sekolah, 2016-2018



Sumber: BPS, Susenas Maret 2015-2018

6

AKSES MEDIA MASSA

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan komunikasi untuk berinteraksi antar sesama. Komunikasi merupakan kebutuhan mendasar manusia untuk saling berhubungan, saling membutuhkan dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman. Saat ini kemajuan teknologi sangat membantu masyarakat untuk dapat berkomunikasi.

Media massa merupakan salah satu alat yang memudahkan dalam berkomunikasi. Dengan adanya media massa, masyarakat luas dapat menikmati berbagai informasi dari segala penjuru dunia. Selain sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, media massa juga berfungsi sebagai sarana menambah pengetahuan dan hiburan. Berdasarkan perkembangannya, media massa dibedakan menjadi dua jenis yaitu media massa tradisional (surat kabar, majalah, radio, televisi) dan media massa modern (internet dan telepon selular).

Surat kabar dan majalah termasuk ke dalam media cetak sedangkan radio, televisi, telepon dan internet termasuk ke dalam media elektronik. Baik media cetak maupun elektronik

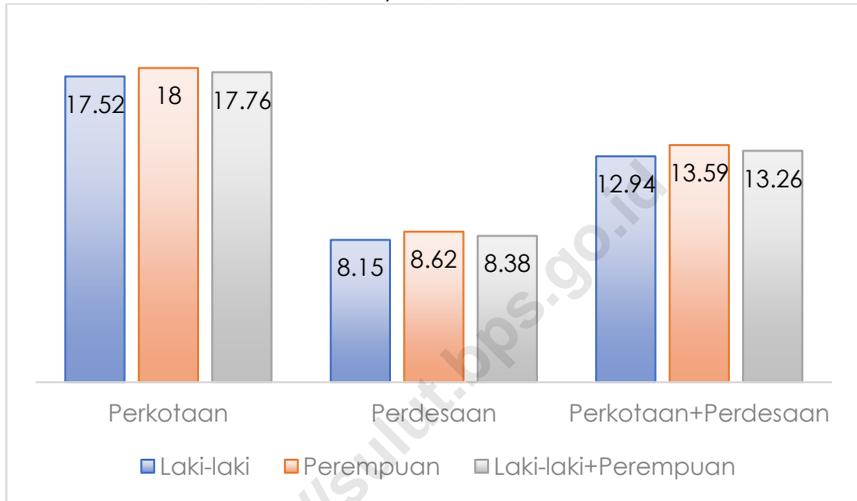
mempunyai keunggulan masing-masing dalam menyuguhkan informasi baik verbal maupun visual secara jelas kepada para pemakainya.

Pada bab ini diulas beberapa indikator umum yang digunakan untuk mengukur akses masyarakat terhadap media massa, diantaranya partisipasi penduduk berumur 10 tahun ke atas yang memanfaatkan media massa seperti mendengarkan radio, menonton televisi, membaca surat kabar/majalah, dan mengakses internet.

6.1 Akses Terhadap Media Elektronik

Dari gambar 6.1 menunjukkan bahwa preferensi penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mendengarkan radio sangat rendah. Penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mendengar radio di kota dengan di desa berbeda cukup signifikan. Persentase di kota sebesar 17,76 persen sedangkan di desa 8,38 persen. Sedangkan dari jenis kelamin perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda, yakni 12,94 persen untuk laki-laki dan 13,59 persen untuk perempuan.

Gambar 6.1 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Mendengarkan Siaran Radio Selama Seminggu Terakhir Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2018



Sumber : BPS, Susenas MSBP 2018

Dilihat dari frekuensi mendengarkan radio, persentase penduduk berumur 10 tahun keatas yang mendengar radio selama satu sampai dua hari dalam seminggu diperkirakan lebih tinggi daripada di perdesaan yaitu 19,19 persen berbanding 17,12 persen. Hal serupa terjadi pada frekuensi mendengarkan radio selama tiga sampai lima hari. Sedangkan pada frekuensi mendengarkan radio hampir setiap hari dalam seminggu (6-7 hari), penduduk di perdesaan lebih tinggi dibandingkan penduduk di perkotaan, yaitu sebesar 55,69 persen berbanding 47,60 persen.

Tabel 6.1 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Mendengarkan Radio Selama Seminggu Terakhir Menurut Frekuensi Mendengarkan dan Tipe Daerah, 2018

Frekuensi Mendengarkan (Hari)	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
1-2	19,19	17,12	18,56
3-5	33,21	27,19	31,38
6-7	47,60	55,69	50,06
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber:BPS, Susenas MSBP 2018

Berdasarkan frekuensi mendengarkan radio baik laki-laki maupun perempuan tidak cukup berbeda. Sebesar 50,06 persen penduduk berumur 10 tahun ke atas mendengarkan radio hampir setiap hari dalam seminggu (6-7 hari).

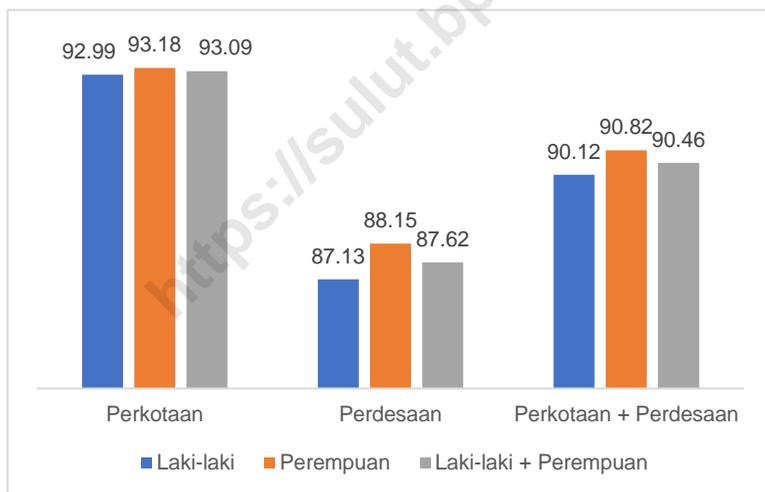
Tabel 6.2 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Mendengarkan Radio Selama Seminggu Terakhir Menurut Frekuensi Mendengarkan dan Jenis Kelamin, 2018

Frekuensi Mendengarkan (Hari)	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki +Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1-2	18,33	18,79	18,56
3-5	30,60	32,16	31,38
6-7	51,07	49,05	50,06
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber:BPS, Susenas MSBP 2018

Gambar 6.2 mengindikasikan bahwa preferensi penduduk berumur 10 tahun ke atas yang menonton televisi cukup tinggi baik di perkotaan maupun di pedesaan. Sebesar 90,12 persen laki-laki menonton televisi selama seminggu terakhir sedangkan persentase perempuan yang menonton televisi yaitu sebesar 90,82 persen.

Gambar 6.2 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Menonton Televisi Selama Seminggu Terakhir Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2018



Sumber: BPS, Susenas MSBP 2018

Frekuensi menonton televisi penduduk berumur 10 tahun ke atas cukup berbeda antara perkotaan dan pedesaan. Persentase penduduk di perkotaan yang menonton televisi sebesar 93,09 persen dan di pedesaan 87,62 persen seperti yang terlihat di gambar 6.2. Sebesar 88,88 persen penduduk di

perkotaan menonton televisi selama 6 sampai dengan 7 hari sedangkan di perdesaan sebesar 82,17 persen penduduk menonton televisi dengan frekuensi yang sama.

Tabel 6.3 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Menonton Televisi Selama Seminggu Terakhir Menurut Frekuensi Menonton dan Tipe Daerah, 2018

Frekuensi Menonton (Hari)	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
1-2	3,33	6,22	4,67
3-5	7,79	11,61	9,57
6-7	88,88	82,17	85,76
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Susenas MSBP 2018

Sebagian besar penduduk berumur 10 tahun ke atas memiliki frekuensi menonton televisi 6-7 hari dalam seminggu. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di Sulawesi Utara sebagian besar menonton televisi setiap hari. Penduduk perempuan cenderung memiliki minat yang sedikit lebih tinggi dalam hal menonton siaran televisi dibandingkan laki-laki yaitu 86,23 persen berbanding 85,31 persen.

Tabel 6.4 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Menonton Televisi Selama Seminggu Terakhir Menurut Frekuensi Menonton dan Jenis Kelamin, 2018

Frekuensi Menonton (Hari)	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1-2	4,75	4,58	4,67
3-5	9,94	9,18	9,57
6-7	85,31	86,23	85,76
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Susenas MSBP 2018

6.2 Akses Terhadap Media Cetak

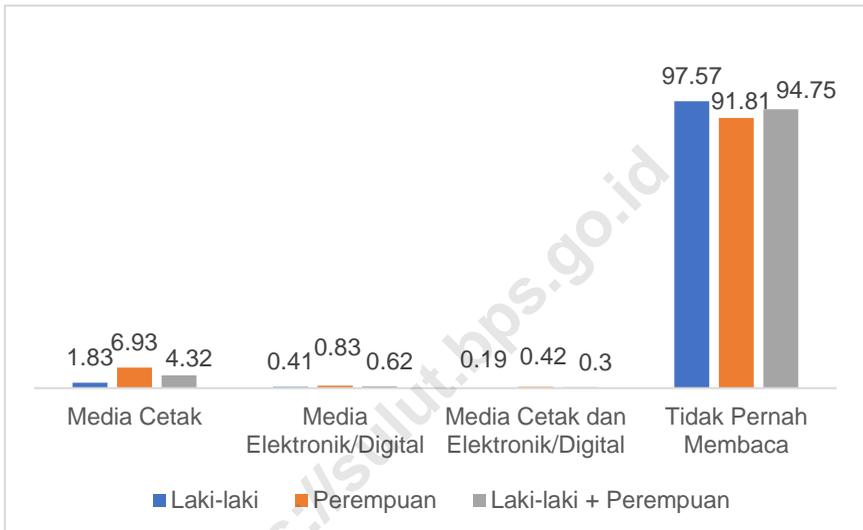
Sebagian besar penduduk Sulawesi Utara yang berumur 10 tahun ke atas tidak pernah membaca koran/surat kabar dalam seminggu terakhir. Penduduk yang membaca koran dalam bentuk media cetak sebanyak 17,82 persen sedangkan dalam bentuk elektronik/digital masih sedikit yaitu hanya sebesar 2,28 persen. Sedangkan yang membaca dalam bentuk media cetak adalah 17,82 persen. Penduduk berumur 10 tahun ke atas yang membaca koran/surat kabar dalam bentuk elektronik/digital masih sedikit, yaitu sebesar 2,28 persen.

Tabel 6.5 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Membaca Surat Koran/Surat Kabar menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2018

Tipe Daerah / Jenis Kelamin		Pernah, Media Cetak	Pernah, Media Elektronik /Digital	Pernah, Media Cetak Dan Elektronik /Digital	Tidak Pernah Membaca
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Kota	L	23,64	3,63	2,63	70,10
	P	19,44	3,29	1,70	75,57
	L+P	21,54	3,46	2,17	72,83
Desa	L	15,36	0,99	0,43	83,22
	P	12,04	1,03	0,44	86,49
	L+P	13,77	1,01	0,44	84,78
Kota + Desa	L	19,59	2,34	1,56	76,52
	P	15,96	2,23	1,11	80,70
	L+P	17,82	2,28	1,34	78,56

Sumber: BPS, Susenas MSBP 2018

Gambar 6.3 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Membaca Majalah/Tabloid menurut Jenis Kelamin 2018



Sumber: BPS, Susenas MSBP 2018

Sebanyak 94,75 persen penduduk Sulawesi Utara yang berumur 10 tahun ke atas tidak pernah membaca majalah/tabloid selama seminggu terakhir. Majalah/tabloid dalam bentuk media cetak masih menjadi wujud yang paling banyak dibaca yakni sebesar 4,32 persen. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk perempuan lebih banyak yang membaca majalah/tabloid dibanding penduduk laki-laki.

Tabel 6.6 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Membaca Majalah/Tabloid menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2018

Tipe Daerah / Jenis Kelamin		Pernah, Media Cetak	Pernah, Media Elektronik/ Digital	Pernah, Media Cetak Dan Elektronik/ Digital	Tidak Pernah Membaca
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Kota	L	2,43	0,58	0,13	96,87
	P	9,28	1,19	0,44	89,09
	L+P	5,85	0,88	0,28	92,99
Desa	L	1,21	0,25	0,24	98,30
	P	4,27	0,43	0,40	94,90
	L+P	2,67	0,33	0,32	96,67
Kota + Desa	L	1,83	0,41	0,19	97,57
	P	6,93	0,83	0,42	91,81
	L+P	4,32	0,62	0,30	94,75

Sumber: BPS, Susenas MSBP 2018

Serupa dengan membaca majalah/tabloid, minat baca penduduk berumur 10 tahun ke atas terhadap buku cerita juga sangat rendah. Hanya 5,69 persen yang membaca buku cerita, baik dalam bentuk media cetak (5,11 persen), media elektronik/digital (0,43 persen), serta media cetak dan elektronik/digital (0,15 persen).

Tabel 6.7 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Membaca Buku Cerita menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2018

Tipe Daerah / Jenis Kelamin		Pernah, Media Cetak	Pernah, Media Elektronik/Digital	Pernah, Media Cetak Dan Elektronik/Digital	Tidak Pernah Membaca
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Kota	L	2,94	0,32	0,04	96,69
	P	4,70	0,27	0,13	94,89
	L+P	3,82	0,30	0,09	95,80
Desa	L	5,50	0,46	0,20	93,84
	P	7,59	0,70	0,22	91,48
	L+P	6,50	0,58	0,21	92,71
Kota + Desa	L	4,19	0,39	0,12	95,29
	P	6,06	0,48	0,17	93,29
	L+P	5,11	0,43	0,15	94,31

Sumber: BPS, Susenas MSBP 2018

Penduduk Sulawesi Utara yang berumur 10 tahun ke atas sebagian besar tidak pernah membaca buku pelajaran sekolah selama seminggu terakhir. Hanya 18,47 persen yang membaca buku pelajaran sekolah, baik dalam bentuk media cetak (16,90 persen), media elektronik/digital (0,52 persen), dan media cetak dan elektronik/digital (1,04 persen).

Tabel 6.8 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Membaca Buku Pelajaran Sekolah menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2018

Tipe Daerah / Jenis Kelamin		Pernah, Media Cetak	Pernah, Media Elektronik /Digital	Pernah, Media Cetak Dan Elektronik /Digital	Tidak Pernah Membaca
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Kota	L	15,79	0,41	0,52	83,28
	P	21,24	0,33	1,07	77,36
	L+P	18,51	0,37	0,80	80,33
Desa	L	14,28	0,43	1,22	84,07
	P	16,13	0,97	1,39	81,51
	L+P	15,17	0,69	1,30	82,84
Kota + Desa	L	15,05	0,42	0,86	83,67
	P	18,84	0,63	1,22	79,31
	L+P	16,90	0,52	1,04	81,53

Sumber: BPS, Susenas MSBP 2018

Penduduk Sulawesi Utara yang berumur 10 tahun ke atas sebagian besar tidak pernah membaca buku pengetahuan selama seminggu terakhir. Hanya 16,97 persen yang membaca buku cerita, baik dalam bentuk media cetak (15,15 persen), media elektronik/digital (0,86 persen), dan media cetak dan elektronik/digital (0,97 persen).

Tabel 6.9 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Membaca Buku Pengetahuan menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2018

Tipe Daerah / Jenis Kelamin	Pernah, Media Cetak	Pernah, Media Elektronik/ Digital	Pernah, Media Cetak Dan Elektronik/ Digital	Tidak Pernah Membaca	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Kota	L	14,64	0,70	0,62	84,05
	P	16,88	1,08	1,07	80,96
	L+P	15,75	0,89	0,85	82,51
Desa	L	13,48	0,71	0,99	84,82
	P	15,59	0,94	1,22	82,25
	L+P	14,49	0,82	1,10	83,59
Kota + Desa	L	14,07	0,70	0,80	84,42
	P	16,27	1,02	1,14	81,57
	L+P	15,15	0,86	0,97	83,03

Sumber: BPS, Susenas MSBP 2018

Mayoritas dari penduduk berumur 10 tahun ke atas Sulawesi Utara membaca kitab suci selama seminggu terakhir. Sebanyak 77,94 persen membaca dalam bentuk media cetak, 0,84 persen dalam bentuk media elektronik/digital, 1,15 persen dalam bentuk media cetak dan elektronik/digital, dan 20,06 persen tidak pernah membaca.

Tabel 6.10 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Membaca Kitab Suci menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2018

Tipe Daerah / Jenis Kelamin		Pernah, Media Cetak	Pernah, Media Elektronik/Digital	Pernah, Media Cetak Dan Elektronik/Digital	Tidak Pernah Membaca
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Kota	L	82,74	0,13	0,55	16,57
	P	84,54	0,27	1,23	13,96
	L+P	83,64	0,20	0,89	15,27
Desa	L	67,66	1,54	1,24	29,56
	P	76,25	1,53	1,66	20,57
	L+P	71,77	1,54	1,44	25,26
Kota + Desa	L	75,36	0,82	0,89	22,93
	P	80,65	0,86	1,43	17,06
	L+P	77,94	0,84	1,15	20,06

Sumber: BPS, Susenas MSBP 2018

Sebanyak 11,24 persen penduduk berumur 10 tahun ke atas membaca selain koran/surat kabar, majalah/tabloid, buku cerita pelajaran sekolah, buku pengetahuan, dan kitab suci. Persentase antara laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda. Selain itu, bentuk media cetak masih menjadi media utama yang dibaca.

7

KEGIATAN OLAHRAGA

Olahraga merupakan salah satu aktifitas yang dapat menyehatkan tubuh. Selain menyehatkan, olahraga juga memiliki manfaat yang sangat baik bagi psikologi manusia. Dalam dunia olahraga terdapat istilah *Mens Sana In Corpore Sano* yang artinya “dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat”. Sehingga dapat dikatakan bahwa berolahraga tidak sekedar menyehatkan raga tapi juga akan menyehatkan jiwa. Berbicara mengenai olahraga tidak dapat terlepas dari istilah lama yang sudah cukup membekas yaitu “mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga”. Melalui hal tersebut masyarakat diharapkan menjadikan olahraga sebagai suatu kebiasaan. Kesadaran masyarakat untuk berolahraga memang harus terus dipelihara. Komite Olimpiade Internasional (IOC) sejak tahun 1983 telah mempromosikan program *Sport for All*, yaitu olahraga bagi seluruh masyarakat. Program ini bertujuan mendorong terwujudnya suatu kondisi di mana aktivitas olahraga dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa mengenal batas usia, jenis kelamin, maupun kondisi sosial ekonomi. Sehingga melalui program ini masyarakat akan lebih

menyebarkan manfaat Kesehatan dan sosial yang bisa diperoleh melalui olahraga (Soegiyanto,2013).

Bab ini akan menggambarkan beberapa aspek yang berkaitan dengan kegiatan olahraga, seperti tingkat partisipasi berolahraga, tujuan berolahraga, frekuensi dan intensitas berolahraga, jenis olahraga yang dilakukan serta jalur melakukan kegiatan olahraga.

7.1 Partisipasi Berolahraga

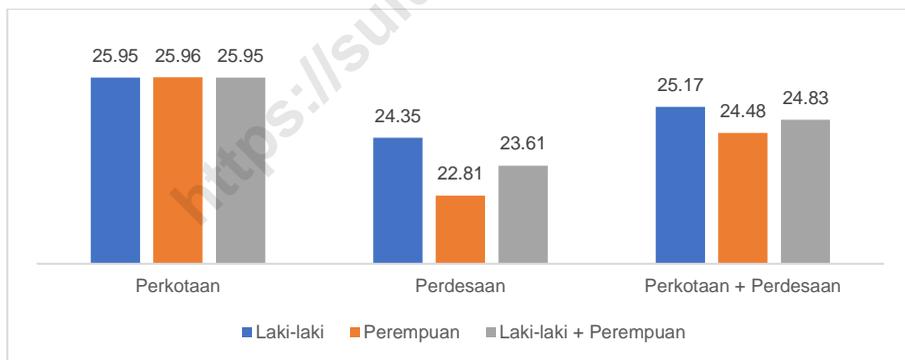
Isu global terkait gaya hidup sehat telah menjadi acuan banyak negara dan Lembaga untuk senantiasa mendorong masyarakat supaya aktif terlibat dalam aktivitas fisik, khususnya melalui kegiatan olahraga. Hidup aktif memberikan banyak manfaat untuk Kesehatan. Selain menjauhkan dari berbagai penyakit fisik, olahraga juga dapat menjauhkan dari gangguan jiwa seperti depresi. Dengan kata lain, olahraga selain membuat jasmani menjadi lebih kuat sekaligus membuat jiwa menjadi lebih sehat.

Kesadaran masyarakat Sulawesi Utara dalam berolahraga masih cukup rendah. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 7.1, di tahun 2018 penduduk Sulawesi Utara berusia 10 tahun ke atas yang berolahraga hanya sebesar 24,83 persen. Hal ini berarti dari 100 penduduk, hanya sekitar 24 sampai 25 orang yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan olahraga.

Partisipasi berolahraga penduduk perkotaan (25,95 persen) lebih tinggi dibandingkan penduduk perdesaan (23,61

persen). Kondisi ini disinyalir karena fasilitas dan jenis olahraga yang berkembang di perkotaan lebih banyak dibandingkan di perdesaan. Olahraga dapat dilakukan oleh berbagai kalangan baik laki-laki maupun perempuan. Partisipasi berolahraga penduduk laki-laki dan perempuan di perkotaan hampir sama. Sebaliknya berbeda dengandi perdesaan, penduduk laki-laki lebih banyak yang berolahraga dibandingkan perempuan yaitu sebesar 24,35 persen berbanding 22,81 persen.

Gambar 7.1 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Melakukan Olahraga Selama Seminggu Terakhir Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2018



Sumber: BPS, Susenas MSBP 2018

7.2 Tujuan Berolahraga

Setiap orang mempunyai tujuan yang berbeda-beda dalam melakukan olahraga. Umumnya seseorang berolahraga untuk meningkatkan dan menjaga stamina tubuh agar tetap sehat. Namun ada juga yang melakukannya untuk meningkatkan prestasi, rekreasi dan lainnya. Tujuan olahraga untuk prestasi

biasanya dilakukan oleh mereka yang mempunyai minat dan bakat dalam olahraga dan dikembangkan secara profesional untuk mencapai prestasi. Olahraga untuk rekreasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan kegembiraan yang menyegarkan dan menghilangkan kejenuhan dari aktivitas sehari-hari. Tujuan lainnya dari berolahraga misalnya olahraga dilakukan saat pelajaran sekolah.

Mayoritas penduduk berumur 10 tahun ke atas melakukan olahraga untuk tujuan menjaga kesehatan (44,17 persen). Selanjutnya penduduk Sulawesi Utara melakukan olahraga bertujuan untuk memenuhi kurikulum sekolah (35,18 persen), untuk hobi/rekreasi (17,67 persen), alasan prestasi (1,41 persen), alasan lainnya (1,11 persen), dan terakhir untuk profesi (0,46 persen).

Tabel 7.1 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Melakukan Olahraga Selama Seminggu Terakhir Menurut Tujuan Olahraga dan Tipe Daerah, 2018

Tujuan Olahraga	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Menjaga Kesehatan	48,10	39,47	44,17
Prestasi	1,02	1,88	1,41
Hobi/Rekreasi	14,68	21,23	17,67
Kurikulum Sekolah	34,90	35,53	35,18
Profesi	0,58	0,32	0,46
Lainnya	0,72	1,58	1,11
Jumlah	100,00	100,00	100,00

7.3 Frekuensi dan Intensitas Berolahraga

Olahraga merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Kesehatan optimal. Melakukan olahraga atau aktivitas fisik merupakan salah satu pilar gizi seimbang. Untuk itu, setiap orang disarankan untuk melakukan olahraga setiap hari. Namun setiap orang mempunyai kapasitas dan kemampuan yang berbeda untuk melakukannya. Frekuensi olahraga menunjukkan jumlah hari dalam seminggu seseorang melakukan olahraga.

Dari tabel 7.2 menunjukkan bahwa penduduk Sulawesi Utara yang berumur 10 tahun ke atas berolahraga setidaknya sekali dalam seminggu sebesar 69,19 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk yang melakukan olahraga hanya melakukannya sekali dalam seminggu. Hanya 5,49 persen penduduk berumur 10 tahun ke atas melakukan olahraga setiap hari dalam seminggu terakhir. Mayoritas penduduk perkotaan maupun perdesaan melakukan olahraga hanya satu hari dalam seminggu terakhir (73,88 persen dan 63,61 persen), disusul 2-4 hari dalam seminggu terakhir (18,16 persen dan 24,72 persen).

Tabel 7.2 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Melakukan Olahraga Selama Seminggu Terakhir Menurut Lamanya Melakukan Olahraga (Hari) dan Tipe Daerah, 2018

Lamanya Melakukan Olahraga (Hari)	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	73,88	63,61	69,19
2-4	18,16	24,72	21,15
5-6	3,35	5,14	4,17
7	4,61	6,53	5,49
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Susenas MSBP 2018

Intensitas berolahraga menunjukkan berapa menit dalam sehari seseorang melakukan olahraga. Pada tabel 7.3 dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk yang berolahraga, rata-rata melakukannya selama 31-60 menit dalam sehari (47,05 persen). Selain itu sebesar 22,08 persen penduduk berumur 10 tahun ke atas yang berolahraga selama 61-120 menit dalam sehari. Jika dilihat berdasarkan tipe daerah, mayoritas penduduk perkotaan berolahraga selama 31-60 menit sehari (53,05 persen) diikuti lamanya berolahraga 61-120 menit (23,57 persen). Kondisi serupa juga terjadi di perdesaan dimana penduduk berumur 10 tahun ke atas juga berolahraga dengan intensitas yang sama.

Tabel 7.3 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Melakukan Olahraga Selama Seminggu Terakhir Menurut Rata-Rata Lamanya Melakukan Olahraga per Hari dan Tipe Daerah, 2018

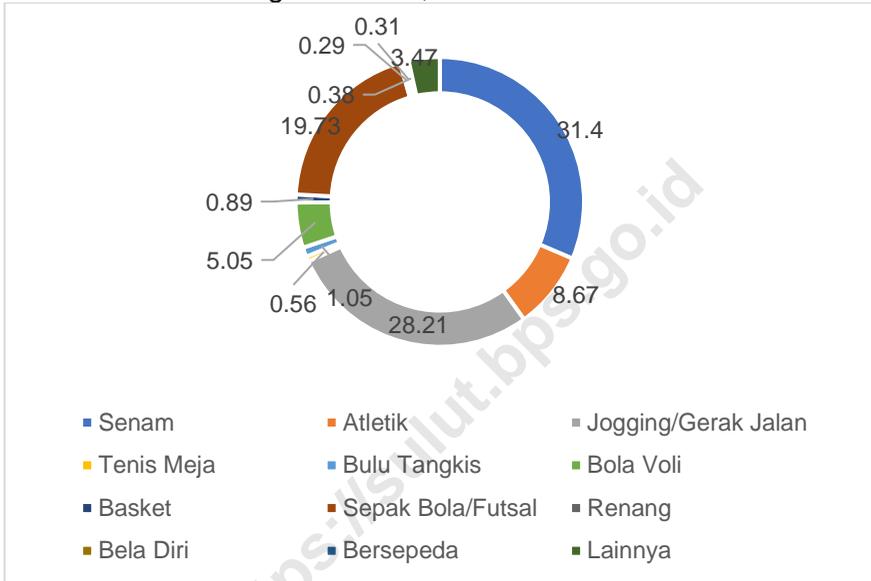
Lamanya Melakukan Olahraga (Menit)	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
≤ 30	14,62	21,29	17,66
31-60	53,05	39,90	47,05
61-120	23,57	20,32	22,08
> 120	8,77	18,49	13,20
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS,Susenas MSBP 2018

7.4 Jenis Olahraga

Dari gambar 7.2 memberikan gambaran jenis olahraga yang sering dilakukan oleh masyarakat di Sulawesi Utara. Jenis olahraga yang paling sering dilakukan oleh penduduk berumur 10 tahun ke atas adalah senam (31,40 persen) dan jogging/gerak jalan (28,21 persen). Kedua olahraga tersebut banyak dipilih sebagai alternatif dalam melakukan kegiatan olahraga. Hal ini salah satunya disebabkan jenis olahraga tersebut mudah dilakukan dan merupakan olahraga yang digemari oleh berbagai kalangan umur.

Gambar 7.2 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Melakukan Olahraga Selama Seminggu Terakhir Menurut Jenis Olahraga yang Paling Sering Dilakukan, 2018



Sumber: BPS, Susenas MSBP 2018

7.5 Jalur/Wadah Olahraga

Seseorang dapat melakukan olahraga sendiri tanpa ada yang mengorganisasikan atau mengikuti perkumpulan tertentu. Akan tetapi di dalam masyarakat terdapat banyak jalur/wadah olahraga yang bertujuan memfasilitasi penduduk dalam melakukan olahraga. Jalur/wadah olahraga yang dapat dimanfaatkan antara lain; sekolah, perkumpulan olahraga, tempat kerja, atau wadah lainnya, misalnya karang taruna.

Tabel 7.4 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Melakukan Olahraga Selama Seminggu Terakhir Menurut Jalur Melakukan Olahraga dan Tipe Daerah, 2018

Jalur Melakukan Olahraga	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Sendiri	37,28	38,06	37,64
Sekolah	37,28	40,49	39,04
Perkumpulan Olahraga	8,09	12,31	10,02
Tempat Kerja	9,54	3,23	6,66
Lainnya	7,27	5,91	6,65
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Susenas MSBP 2018

Tabel 7.4 menampilkan persentase penduduk yang melakukan olahraga menurut jalur olahraga. Dari tabel tersebut dapat dilihat terdapat perbedaan antara penduduk perkotaan dan perdesaan. Di perkotaan, mayoritas penduduknya memanfaatkan jalur sendiri yang besarnya sama dengan jalur sekolah (37,28 persen) sedangkan di perdesaan mayoritas menggunakan jalur sekolah (40,49 persen). Secara keseluruhan, jalur yang paling banyak digunakan adalah jalur sekolah yaitu sebesar 39,04 persen. Kemudian disusul dengan jalur sendiri sebesar 37,64 persen dan jalur perkumpulan olah raga 10,02 persen. Jalur tempat kerja hanya 6,66 persen, artinya masih sedikit sekali tempat bekerja yang mengadakan aktivitas berolahraga bersama. Kemudian terdapat sebesar 6,65 persen penduduk yang berolahraga menggunakan jalur yang lain.

8

INTERAKSI SOSIAL

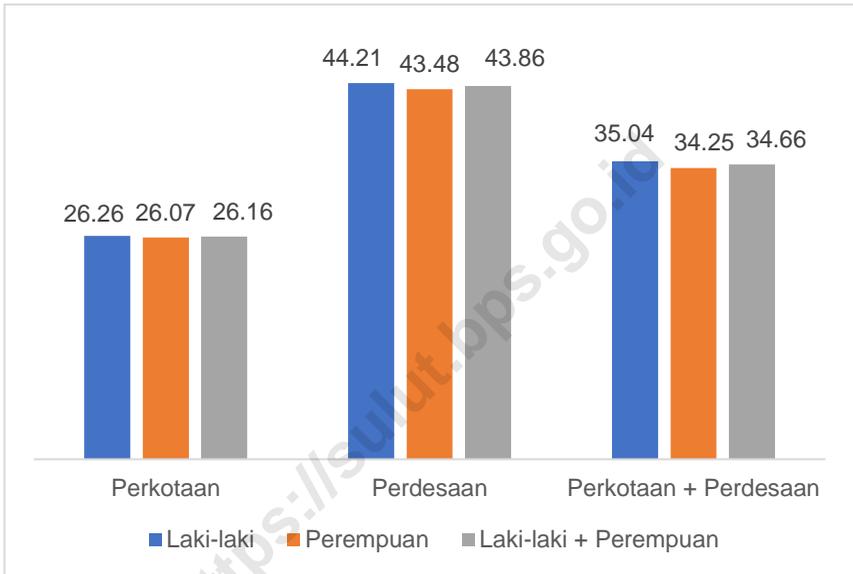
Dalam kehidupan bermasyarakat, terjadinya interaksi sosial antar individu, antar kelompok maupun antara individu dengan kelompok mutlak terjadi, baik yang bersifat positif maupun negatif. Bentuk interaksi sosial yang bersifat positif lebih mengarah pada hal-hal yang bersifat Kerjasama, akomodasi, akulturasi, dan asimilasi. Sedangkan interaksi sosial yang bersifat negatif akan berujung terhadap terjadinya persaingan, pertentangan bahkan pertikaian.

Penerapan nilai-nilai luhur kebangsaan yang menjadi falsafah negeri ini harusnya senantiasa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di tengah arus globalisasi yang dapat membawa perubahan sosial, baik pola pikir maupun kepribadian bangsa. Beberapa interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat menciptakan kondisi tersebut antara lain: rapat, gotong royong, perkumpulan komunitas, dan lainnya. Seluruh kegiatan tersebut dapat menggambarkan sejauh mana keterlibatan penduduk dalam setiap kegiatan yang ada di lingkungan sekitar mereka. Penjelasan yang lebih rinci akan disampaikan pada pembahasan berikut.

8.1 Partisipasi dalam Kegiatan Pertemuan (Rapat

Kebebasan berkumpul, berpendapat dan berorganisasi adalah hak asasi setiap masyarakat sebagai salah satu kekuatan dalam iklim demokrasi untuk menyalurkan aspirasinya dalam pembangunan nasional. Salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi yaitu adanya kegiatan pertemuan atau rapat. Dalam pertemuan atau rapat diharapkan proses kerja dan target waktu tercapai, sekaligus permasalahan dapat diselesaikan dengan segera. Susenas MSBP 2018 mengumpulkan data mengenai partisipasi penduduk berumur 10 tahun ke atas yang pernah mengikuti pertemuan atau rapat di lingkungan sekitar dalam setahun terakhir. Lingkungan sekitar yang dimaksud adalah lingkungan tempat tinggal yang masih dalam lingkup RT/RW/Dusun/Desa/Kelurahan.

Gambar 8.1 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Mengikuti Kegiatan Pertemuan (Rapat) di Lingkungan Sekitar dalam Setahun Terakhir Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2018

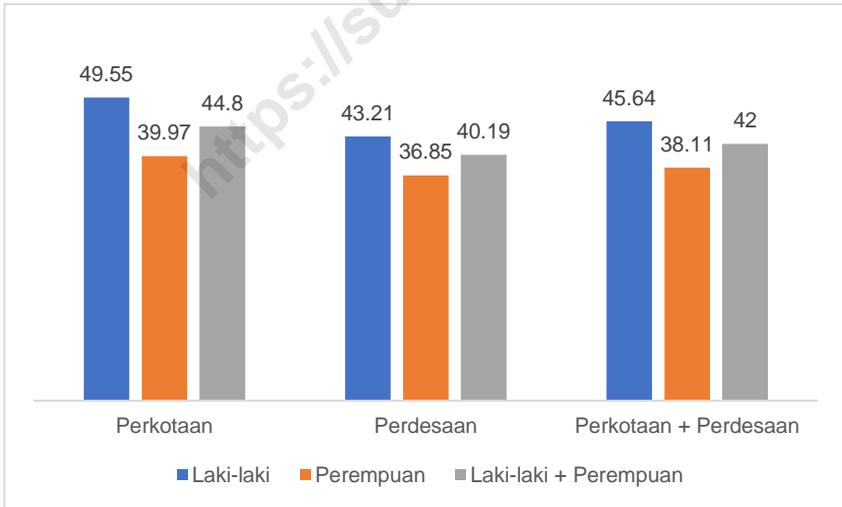


Sumber: BPS, Susenas MSBP 2018

Partisipasi penduduk berumur 10 tahun ke atas dalam kegiatan pertemuan (rapat) masih dapat dikatakan rendah karena masih di bawah separuh (34,66 persen). Perbedaan partisipasi dalam rapat antara penduduk di perdesaan dan perkotaan juga cukup jauh. Di perkotaan persentasenya sebesar 26,16 persen sedangkan di perdesaan persentasenya sebesar 43,86 persen. Hal ini bisa menunjukkan bahwa pada lingkungan perdesaan hubungan antar penduduk masih sangat akrab dan masih memegang teguh tradisi yang berlaku turut berperan dalam menciptakan kondisi tersebut. Dengan ketersediaan sarana dan

prasarana komunikasi di perdesaan, rapat juga menjadi salah satu media bagi masyarakat perdesaan dalam berkomunikasi dan anjangan dengan warga lainnya. Sedangkan dari segi jenis kelamin, tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang mengikuti rapat sebesar 35,04 persen dan 34,25 persen. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki keaktifan yang hampir sama dalam berorganisasi.

Gambar 8.2 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Memberikan Saran/Pendapat Dalam Kegiatan Pertemuan (Rapat) di Lingkungan Sekitar Setahun Terakhir Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2018



Sumber: BPS, Susenas MSBP 2018

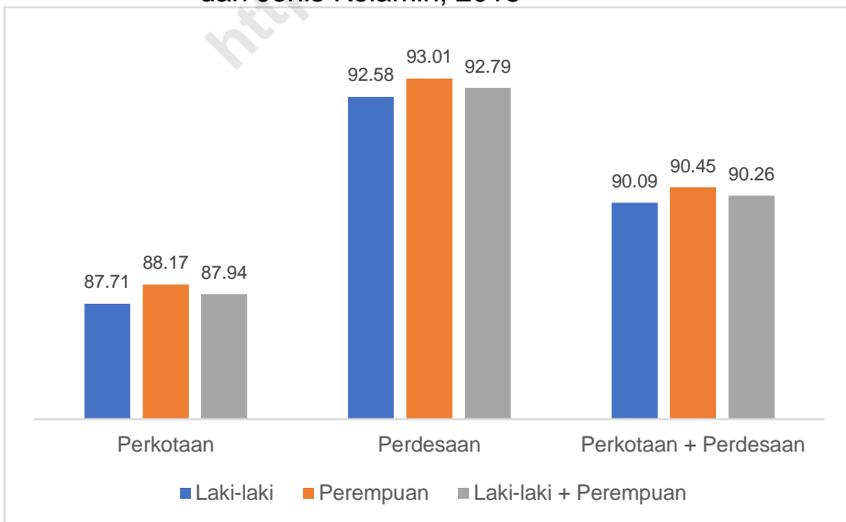
Pertemuan (rapat) dapat menjadi forum bagi penyelesaian masalah atau program yang melibatkan banyak pihak. Di dalam pertemuan (rapat) semua pihak bebas untuk melakukan saran, kritik dan menyampaikan pendapat secara terbuka, fokus dan lugas. Akan tetapi kebebasan mengemukakan pendapat tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab sehingga pendapat yang dikemukakan akan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dari seluruh penduduk berumur 10 tahun ke atas di Sulawesi Utara yang mengikuti pertemuan (rapat), sebesar 42,00 persen pernah mengeluarkan pendapat pada saat rapat. Jika dilihat dari tipe daerah, penduduk di perkotaan cenderung lebih banyak yang pernah mengeluarkan pendapat dibanding dengan penduduk di perdesaan, yakni masing-masing sebesar 44,8 persen dan 40,19 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di perkotaan cenderung lebih berani dalam mengungkapkan pendapatnya dalam pertemuan maupun forum, sedangkan penduduk di perdesaan cenderung kurang kritis dalam pertemuan. Sedangkan jika dilihat dari jenis kelaminnya, terdapat perbedaan yang signifikan antara penduduk laki-laki dengan perempuan, dengan masing-masing sebesar 45,64 persen dan 38,11 persen.

8.2 Partisipasi dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat sendiri melainkan bergantung pada manusia yang lain. Ketergantungan manusia disebabkan oleh kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan terhadap manusia lain pada akhirnya mendorong terbentuknya kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Sejalan dengan itu, kemampuan masyarakat untuk melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial merupakan salah satu kunci keberhasilan membangun modal sosial melalui rasa percaya diri (trust) dan hubungan timbal balik (resiprositas) dengan saling memberi dan menerima antar individu/kelompok.

Gambar 8.3 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan selama Tiga bulan Terakhir Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2018



Sumber: BPS, Susenas MSBP 2018

Hasil Susenas menunjukkan bahwa partisipasi penduduk dalam kegiatan kemasyarakatan di lingkungan sekitar cukup besar, seperti yang terlihat pada gambar 8.3 penduduk yang pernah mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar sebesar 90,26 persen. Jika dilihat berdasarkan tipe daerah, penduduk di perdesaan cenderung lebih banyak mengikuti kegiatan kemasyarakatan dibandingkan dengan di perkotaan, di mana masing-masing sebesar 87,94 persen di perkotaan dan 92,79 persen di perdesaan. Perbedaan yang cukup signifikan ini menunjukkan bahwa di perdesaan sebagian besar masih aktif dalam berkegiatan sosial. Sedangkan minat penduduk kota dalam kegiatan sosial kemasyarakatan sudah menurun. Sementara itu jika dilihat dari segi jenis kelaminnya penduduk perempuan lebih banyak mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dibanding penduduk laki-laki. Meski begitu, perbedaan tersebut tidak terlalu jauh baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Tabel 8.1 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Yang Tidak Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Selama Tiga Bulan Terakhir Menurut Alasan Utama Tidak Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Dan Tipe Daerah, 2018

Alasan	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Malas	3,20	4,23	3,71
Tidak Suka/Tidak Bermanfaat	6,65	13,39	9,94
Tidak Ada Waktu	41,43	41,10	41,27
Malu/Rendah Diri	0,77	0,89	0,83
Sakit	3,52	2,78	3,16
Masih Bersekolah	12,77	12,06	12,42
Lainnya	31,66	25,55	28,68
Jumlah	100,0	100,0	100,00

Sumber: BPS, Susenas MSBP 2018

Partisipasi seseorang dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan selain menumbuhkan rasa persaudaraan dan silaturahmi juga akan menimbulkan berbagai konsekuensi. Konsekuensi itu diantaranya tersitanya waktu, tenaga, dan pikiran yang mungkin dapat digunakan untuk kegiatan rutin lainnya, Seperti belajar, bekerja dan mengurus rumah tangga. Hal inilah yang diduga sebagai penyebab tidak semua penduduk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Tabel 8.1 menunjukkan beberapa alasan utama penduduk tidak

berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Secara keseluruhan, alasan utama penduduk tidak ikut kegiatan sosial kemasyarakatan dikarenakan tidak ada waktu (41,27 persen). Jika dilihat secara tipe daerah, tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara penduduk perkotaan dan perdesaan. Pada penduduk perkotaan, alasan utama tidak mengikuti kegiatan sosial adalah tidak ada waktu (41,43 persen) sedikit lebih besar dibandingkan penduduk perdesaan dengan alasan yang sama sebesar (41,10 persen).

8.3 Partisipasi dalam Kegiatan Organisasi

Salah satu bentuk dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat adalah pengorganisasian masyarakat. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat mengorganisir komunitas maupun masyarakat dimana mereka bertempat tinggal untuk mengembangkan seluruh potensi dan sikap hidup yang ada pada diri mereka. Keterlibatan masyarakat dalam dunia organisasi jelas merupakan suatu hal positif yang harus dibudidayakan karena di dalamnya mereka belajar untuk mengatur, mengelola, dan mengembangkan kegiatan/program yang mereka rencanakan sehingga cita-cita terbentuknya masyarakat yang berdaya dan mandiri dapat terwujud.

Untuk melihat sejauh mana partisipasi masyarakat Sulawesi Utara dalam dunia organisasi dapat dilihat pada tabel 8.2. Pada tahun 2018, partisipasi penduduk berumur 10 tahun ke atas dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja/sekolah

hanya sebesar 12,76 persen. Sementara itu, sebesar 6,61 persen penduduk menjadi anggota tetap tidak aktif dan sebesar 80,63 persen tidak mengikuti organisasi.

Tabel 8.2 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Mengikuti Kegiatan Organisasi Selain di Tempat Kerja/Sekolah Menurut Jenis Kelamin, Alasan dan Tipe Daerah, 2018

Tipe Daerah	Laki-Laki			Perempuan			Total		
	Ya, Aktif	Ya, Tidak Aktif	Tidak	Ya, Aktif	Ya, Tidak Aktif	Tidak	Ya, Aktif	Ya, Tidak Aktif	Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Perkotaan	12,12	5,45	82,43	11,81	4,48	83,71	11,97	4,97	83,07
Perdesaan	12,81	8,33	78,85	14,51	8,44	77,05	13,62	8,38	77,99
Perkotaan + Perdesaan	12,46	6,86	80,68	13,08	6,34	80,58	12,76	6,61	80,63

Sumber: BPS, Susenas MSBP 2018

Dilihat berdasarkan tipe daerah, penduduk perdesaan lebih banyak yang mengikuti organisasi, dengan persentase penduduk yang aktif sebesar 13,62 persen dan yang tidak aktif sebesar 8,38 persen dibandingkan perkotaan yang aktif berorganisasi sebesar 11,97 persen dan yang tidak aktif 4,97 persen. Ditinjau berdasarkan jenis kelamin tidak ada perbedaan yang signifikan antara penduduk laki-laki yang aktif maupun yang perempuan (12,46 persen dibanding 13,08 persen).

Tabel 8.3 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Yang Mengikuti Kegiatan Organisasi Selain Di Tempat Kerja/Sekolah Menurut Jenis Kegiatan, 2018

Bidang Kegiatan Organisasi	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Keagamaan	77,79	55,16	66,20
Politik	1,23	1,94	1,59
Pendidikan	1,84	5,51	3,72
Lingkungan Hidup	0,62	0,94	0,79
Ekonomi	0,22	0,37	0,30
Sosial	15,03	30,78	23,10
Olahraga	0,77	2,12	1,46
Lainnya	2,48	3,18	2,84

Sumber: BPS, Susenas MSBP 2018

Organisasi yang paling banyak diikuti oleh penduduk adalah organisasi yang bergerak di bidang keagamaan yakni sebesar 66,20 persen, kemudian disusul dengan kegiatan sosial sebanyak 23,10 persen, dan pendidikan sebesar 3,72 persen. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 8.3.

Herbert G. Hicks mengemukakan sedikitnya ada dua alasan yang mendasari seseorang untuk berorganisasi. Alasan yang pertama adalah sosial. Sebagai makhluk hidup berkelompok, manusia merasa perlu untuk berorganisasi sebagai bagian dari pergaulan maupun memenuhi kebutuhannya. Alasan yang kedua terkait dengan materi. Melalui bantuan organisasi, manusia melakukan tiga hal yang tidak dapat dilakukan sendiri. Ketiga hal tersebut yaitu memperbesar kemampuannya,

menghemat waktu yang diperlukan untuk mencapai suatu sasaran dan menarik manfaat dari pengetahuan generasi sebelumnya yang telah dihimpun. Berdasarkan Susenas 2018, diketahui alasan utama penduduk Sulawesi Utara mengikuti kegiatan organisasi adalah untuk menambah pengetahuan yakni sebesar 28,29 persen. Lalu alasan kedua adalah alasan lainnya sebesar 26,73 persen. Bagi penduduk perkotaan alasan utama mengikuti kegiatan organisasi adalah untuk menambah pengetahuan yaitu sebesar 31,83 persen. Sedangkan bagi penduduk perdesaan, alasan utama adalah untuk melayani masyarakat yaitu sebesar 27,67 persen. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8.4 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Yang Mengikuti Kegiatan Organisasi Selain Di Tempat Kerja/Sekolah Menurut Alasan Mengikuti Kegiatan, 2018

Alasan Mengikuti Organisasi	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Belajar Kepemimpinan	5,22	5,94	5,59
Menambah Pengetahuan	31,83	24,91	28,29
Mengisi Waktu Luang	7,69	10,40	9,08
Mencari Teman	5,55	5,33	5,44
Melayani Masyarakat	21,94	27,67	24,87
Lainnya	27,76	25,75	26,73

Sumber: BPS, Susenas MSBP 2018

9

AKSES TERHADAP KEGIATAN SENI DAN BUDAYA

Konsep seni menurut UU No. 5 tahun 2017 adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni termasuk diantaranya yaitu seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik dan seni media.

Dalam kehidupan sosial, salah satu tujuan diciptakannya seni adalah untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Sejalan dengan itu kebutuhan akan seni terus berkembang seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Begitu pula dengan hasil karya dan cipta seni yang juga mengalami perkembangan, sesuai dengan kebudayaan yang ada di masyarakat. Bab ini menyajikan secara khusus kegiatan kesenian yang mencakup berbagai jenis dan cabang seni tersebut. Aspek yang disajikan mencakup akses, partisipasi, apresiasi masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan seni dan budaya serta tradisi lisan.

9.1 Akses pada Pertunjukan/Pameran Seni

Sebagai salah satu bentuk kebudayaan manusia, kesenian berbeda dengan hasil budaya lainnya. Kesenian merupakan hasil karya, cipta dan rasa yang mengandung nilai estetika tinggi dan sarat dengan pesan moral yang dikemas dalam bentuk simbol-simbol.

Karya seni yang dihasilkan terdiri dari berbagai macam jenis pertunjukan, antara lain seni tari, seni tetater, seni musik dan lain-lain. Ketertarikan masyarakat terhadap jenis-jenis pertunjukan tersebut berbeda-beda dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti umur, jenis kelamin, tipe daerah dan latar belakang budaya. Apresiasi terhadap pertunjukkan/pameran seni salah satunya dapat dilihat berdasarkan banyaknya penduduk menonton pertunjukkan/pameran seni. Diantara beberapa pertunjukan/pameran seni, seni film (57,06 persen) merupakan pertunjukan seni yang paling banyak ditonton baik secara langsung ataupun tidak langsung oleh penduduk Sulawesi Utara berumur 10 tahun ke atas selama tiga bulan terakhir (lihat tabel 9.1). Minat masyarakat terhadap sinematografi didukung oleh fasilitas menonton film yang semakin mudah diakses membuat seni film lebih banyak ditonton dibandingkan seni musik/suara (43,11 persen). Pelestarian pertunjukan/pameran seni lainnya perlu ditingkatkan agar peminatnya tidak berkurang atau bahkan sampai punah.

Tabel 9.1 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Yang Menonton Pertunjukan/Pameran Seni Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Selama Tiga Bulan Terakhir Menurut Jenis Kesenian Dan Tipe Daerah, 2018

Jenis Kesenian	Perkotaan	Desa	Perkotaan+ Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
Film	51,28	63,33	57,06
Seni Musik/Suara	37,01	49,72	43,11
Seni Rupa	4,08	6,03	5,01
Seni Sastra	4,12	6,97	5,49
Seni Tari Budaya Indonesia	15,81	15,91	15,86
Seni Teater/Pewayangan	5,01	3,63	4,35
Lainnya	9,89	6,29	8,16

Sumber: BPS, Susenas MSBP 2018

Berdasarkan tipe daerah, persentase penduduk yang menonton film lebih banyak di perdesaan (63,33 persen banding 51,28 persen). Demikian juga untuk pertunjukan seni musik/suara, penduduk yang lebih banyak penonton ada di perdesaan (49,72 persen banding 37,01 persen). Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel di atas.

Tabel 9.2 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Yang Terlibat Langsung Pertunjukan/Pameran Seni Secara Langsung Selama Tiga Bulan Terakhir Menurut Jenis Kesenian Dan Tipe Daerah, 2018

Jenis Kesenian	Perkotaan	Desa	Perkotaan+Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
Film	0,15	0,08	0,12
Seni Musik/Suara	2,99	1,16	2,11
Seni Rupa	0,03	0,21	0,12
Seni Sastra	0,02	0,09	0,06
Seni Tari Budaya Indonesia	0,48	0,44	0,46
Seni Teater/Pewayangan	0,05	0,00	0,03
Lainnya	0,04	0,00	0,02

Sumber: BPS, Susenas MSBP 2018

Tabel 9.2 memperlihatkan bahwa dalam tiga bulan terakhir persentase penduduk 10 tahun ke atas yang terlibat dalam pertunjukan seni secara langsung masih sangat rendah. Pertunjukan seni musik/suara menjadi pilihan pertama bagi penduduk untuk terlibat secara langsung yakni sebesar 2,11 persen. Kemudian disusul dengan seni tari budaya Indonesia yakni sebesar 0,46 persen. Di posisi ketiga ada seni film dan seni rupa dengan persentase yang sama sebesar 0,12 persen.

9.2 Akses pada Peninggalan Sejarah/Warisan Budaya

Peninggalan sejarah dan warisan budaya merupakan cagar budaya yang bersifat kebendaan (tangible) yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan. Pemerintah berkewajiban melaksanakan kebijakan pelestarian cagar budaya salah satunya dengan berasaskan kemanfaatan sehingga cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk

kepentingan kesejahteraan rakyat baik dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).

Salah satu apresiasi masyarakat terhadap warisan sejarah dan budaya adalah dengan mengunjungi peninggalan sejarah atau warisan budaya.

Tabel 9.3 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah/Warisan Budaya Selama Setahun Terakhir Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2018

Tipe Daerah	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	13,43	14,24	13,84
Perdesaan	5,87	6,43	6,14
Perkotaan + Perdesaan	9,74	10,57	10,15

Sumber: BPS, Susenas MSBP 2018

Berdasarkan hasil Susenas MSBP 2018, persentase penduduk 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan budaya hanya sekitar 10,15 persen. Jika dilihat berdasarkan tipe daerah, persentase penduduk di perkotaan yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan budaya (13,84 persen) lebih tinggi dari di perdesaan (6,14 persen). sementara dari sisi jenis kelamin penduduk perempuan (10,57 persen) lebih tinggi dibandingkan laki-laki (9,74 persen).

Kecilnya minat masyarakat untuk mengunjungi peninggalan sejarah/warisan budaya salah satunya karena kurang memadainya fasilitas yang memberikan tempat khusus terhadap peninggalan bersejarah dan kurangnya sosialisasi mengenai tempat yang menyimpan peninggalan bersejarah di Sulawesi Utara.

9.3 Tradisi Lisan

Salah satu objek pemajuan kebudayaan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan adalah tradisi lisan. Yang dimaksud dengan “tradisi lisan” adalah tuturan yang diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat. Dalam Susenas, pertanyaan mengenai tradisi lisan khusus hanya menanyakan mengenai dongeng/cerita rakyat. Dongeng adalah cerita dari zaman dahulu yang tidak benar-benar terjadi atau biasa disebut cerita khayal, biasanya berlatar kenyataan yang dikiaskan. Sedangkan cerita rakyat adalah cerita dari zaman dahulu yang hidup di kalangan rakyat dan diwariskan secara lisan.

Tabel 9.4 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Mengetahui Dongeng/Cerita Rakyat Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin,2018

Tipe Daerah	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	74,65	79,55	77,09
Perdesaan	62,34	63,30	62,80
Perkotaan + Perdesaan	68,63	71,91	70,23

Sumber: BPS, Susenas 2018

Berdasarkan hasil Susenas MSBP 2018, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan 70,23 persen penduduk di atas 10 tahun mengetahui dongeng/cerita rakyat. Jika dilihat dari tipe daerah, penduduk di perkotaan (77,09 persen) lebih banyak mengetahui dongeng/cerita rakyat dibanding penduduk di perdesaan (62,80 persen). Sedangkan jika dilihat dari jenis kelamin, penduduk perempuan (71,91 persen) lebih banyak mengetahui dongeng atau cerita rakyat dibanding penduduk laki-laki (68,63 persen).

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Jl. 17 Agustus, Manado 95119

Telp. : (0431) 847004

Homepage : sulut.bps.go.id

Email : bps7100@bps.go.id

ISBN 978-602-5673-41-2



9

786025

673412